



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
www.kab-karimun.go.id

L

A

K

I

P



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2017 Kabupaten Karimun dengan Visi **"Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim Yang Terdepan Berlandaskan Iman dan Taqwa"** untuk pencapaian sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Karimun di Tahun 2018 ini adalah sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2017 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 yang merupakan wujud pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate*. Hal ini sebagai perwujudan komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes dalam rangka penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien, efektif dan akuntabel.

Sejalan dengan fokus pada peningkatan akuntabilitas dan capaian kinerja, Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2017 memberikan informasi tentang capaian kinerja kegiatan dan sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, serta hasil evaluasi capaian kinerja berikut permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam Tahun 2017 serta komitmen untuk meningkatkan kinerja pada masa-masa mendatang. Meskipun secara umum capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun dapat dikatakan "berhasil" mencapai target yang ditetapkan, namun pada beberapa indikator masih perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Oleh karena itu, kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait terutama para pihak yang berkepentingan untuk mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di tahun-tahun berikutnya.

Tanjung Balai Karimun, 29 Maret 2018

 **BUPATI KARIMUN,**

H. AUNUR RAFIQ

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum	2
C. Maksud dan Tujuan	18
D. Sistematika Penyajian	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
A. Rencana Strategis	21
B. Rencana Kinerja.	25
C. Perjanjian Kinerja.	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	34
B. Capaian Indikator Makro	36
C. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja	55
D. Akuntabilitas Keuangan	168
BAB IV PENUTUP	174
A. Simpulan	174
B. Strategis Peningkatan Kinerja	174
LAMPIRAN	
Pengukuran Kinerja	a
Rencana Kinerja Tahunan	g

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2017 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2017 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2017 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2017. Dalam upaya merealisasikan *good governance*, Pemerintah Kabupaten Karimun telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021.

Berdasarkan hasil evaluasi sepanjang Tahun 2017 terhadap pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Karimun, masih terdapat 1 sasaran yang belum memuaskan atau dalam katagori Kurang. Adapun pencapaian sasaran secara keseluruhan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- ❖ 15 (lima Belas) Sasaran Strategis atau 83,33 % diperoleh pencapaian baik sekali yang berimplikasi terhadap pencapaian Visi, Misi serta Tujuan Pemerintah Kabupaten Karimun.
- ❖ 2 (Dua) Sasaran Strategis atau 11,11 % diperoleh pencapaian Baik yang berimplikasi terhadap pencapaian Visi, Misi serta Tujuan Pemerintah Kabupaten.
- ❖ 1 (satu) Sasaran Strategis atau 5,56 % diperoleh pencapaian Kurang yang berimplikasi terhadap pencapaian Visi, Misi serta Tujuan Pemerintah Kabupaten.

Perincian pada masing-masing pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN TAHUN 2017	INDIKATOR	RATA-RATA CAPAIAN	KATEGORI
1.	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi di pusat pertumbuhan Ekonomi Baru	3 Indikator	103,23%	Baik Sekali
2.	Memantapkan Kewirausahaan Petani dan Nelayan	2 Indikator	112,28%	Baik Sekali
3.	Meningkatnya Produktivitas Produksi Sektor Pertanian dan Perikanan	4 Indikator	87,71%	Baik Sekali
4.	Tercapainya Konsumsi Energi Pangan	1 Indikator	101,39 %	Baik Sekali
5.	Terwujudnya Karimun Sebagai Daerah Wisata	2 Indikator	103,025%	Baik Sekali
6.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penghubung antar Wilayah	3 Indikator	107,98%	Baik Sekali
7.	Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Dasar	3 Indikator	103,90%	Baik Sekali
8.	Menurunnya Penduduk Miskin	1 Indikator	89,73%	Baik Sekali
9.	Meningkatnya Derajat Kesehatan	4 Indikator	40,12%	Kurang
10.	Meningkatnya kualitas pendidikan	5 Indikator	99,31%	Baik Sekali
11.	Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal	2 Indikator	82,09%	Baik
12.	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan Kesetaraan Gender	1 Indikator	99,67%	Baik Sekali
13.	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	1 Indikator	79,16%	Baik
14.	Terwujudnya Pola dan Struktur Ruang yang sesuai dengan Tata Ruang Wilayah	1 Indikator	100,41 %	Baik Sekali
15.	Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup	4 Indikator	106,49%	Baik Sekali
16.	Meningkatnya Aktivitas – Aktivitas Keagamaan	2 Indikator	131,49%	Baik Sekali
17.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah	2 Indikator	100,04%	Baik Sekali
18.	Meningkat Kualitas Pelayanan	1 Indikator	106,66%	Baik Sekali

Dari tabel di atas rata-rata capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun pada tahun 2017 adalah sebesar 97,48 %. Pencapaian kinerja input atau penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Karimun pada tahun 2017 adalah sebesar 89,29 % dari total pagu anggaran atau sebesar Rp. 1.261.307.054.442,00

Melalui Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2017 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP. MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; setiap Pemerintah Daerah (Bupati) diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Laporan akuntabilitas kinerja dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan akuntabilitas kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Bertitik tolak dari RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran, dengan demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Karimun menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Bupati kepada Gubernur, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja ini merupakan hasil kegiatan tahun 2017 yaitu tahun kelima RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021.

B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN KARIMUN

Secara administratif Kabupaten Karimun berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tertanggal 11 Juli 2012 mengalami pemekaran dari 9 kecamatan menjadi 12 kecamatan, 29 Kelurahan dan 42 desa, dengan ibukota kabupaten terletak di Tanjung Balai Kecamatan Karimun. Pembagian wilayah administrasi hingga unit desa/kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL I.1.
PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN IBUKOTA
KECAMATAN SERTA JUMLAH DESA DAN KELURAHAN
DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2017

WILAYAH ADMINIS TRASI	IBUKOTA KECAMATAN	JUMLAH				
		KELURA HAN	DESA	RW	RT	PULAU
Moro	Moro	2	10	51	136	84
Durai	Durai	-	4	14	39	46

WILAYAH ADMINIS TRASI	IBUKOTA KECAMATAN	JUMLAH				
		KELURA HAN	DESA	RW	RT	PULAU
Kundur	Tanjung Batu Kota	3	3	51	145	1
Kundur Utara	Tanjung Berlian	1	4	43	93	-
Kundur Barat	Sawang	1	4	44	111	11
Karimun	Tanjung Balai	6	3	40	142	24
Buru	Buru	2	2	29	64	7
Meral	Meral	6	-	30	119	4
Tebing	Tebing	5	1	25	73	5
Meral Barat	Darussalam	2	2	19	55	20
Belat	Sebele	-	6	28	65	25
Ungar	Sei. Buluh	1	3	23	47	22
JUMLAH		29	42	397	1.089	249

1. KONDISI GEOGRAFIS

Kabupaten Karimun merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau, yang berbatasan dengan Negara Singapura dan Negeri Jiran Malaysia, serta berdampingan dengan pusat pertumbuhan industri Batam dan Bintan. Kabupaten Karimun merupakan salah satu kabupaten baru di Provinsi Kepulauan Riau, yang terbentuk berdasarkan UU RI No. 53 tahun 1999. Adapun secara geografis Kabupaten Karimun terbentang antara 00° 24' 36" LU sampai 01° 13' 12" LU dan 103° 13' 12" BT sampai 104° 00' 36" BT, tepat berada pada jalur pelayaran dan dekat dengan zona penerbangan internasional.

Ibukota Kabupaten Karimun terletak di kota Tanjung Balai. Kabupaten Karimun yang berbatasan di sebelah barat dengan Kecamatan Rangsang, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, sebelah timur dengan Kecamatan Belakang Padang (Kota Batam), sebelah selatan dengan Kecamatan Kateman (Kabupaten Indragiri Hilir) serta sebelah utara berbatasan dengan Selat Singapura (Philips Channel), Selat Malaka dan Semenanjung Malaysia, yang dapat digambarkan secara ringkas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Selat Singapura (Philips Channel), Selat Malaka, dan Semenanjung Malaysia.
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Kateman (Kabupaten Indragiri Hilir) dan Kabupaten Lingga.
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Rangsang, Kecamatan Tebing Tinggi (Kabupaten Kepulauan Meranti), dan Kecamatan Kuala Kampar (Kab. Pelalawan).
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Belakang Padang (Kota Batam).

Wilayah Kabupaten Karimun terdiri atas daratan dan perairan, dengan total wilayah mencapai 7.984 Km², dengan luas perairan memiliki persentase jauh lebih besar (80,91%) dibanding luas daratan (19,09%). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL I.2.
PERSENTASE LUAS WILAYAH DARATAN DAN JUMLAH PULAU
MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2017

KECAMATAN	DARATAN		LAUTAN		JUMLAH PULAU
	KM ²	%	KM ²	%	
Moro	1.166,80	76,56	1.668,44	25,83	84
Durai	52,00	3,41	1.480,54	22,92	46
Kundur	34,30	2,25	449,93	6,96	1
Karimun	49,90	3,27	404,06	6,25	24
Kundur Utara	29,50	1,94	509,15	7,88	-
Kundur Barat	21,70	1,42	267,12	4,13	11
Buru	17,80	1,17	366,88	5,68	7
Meral	80,00	5,25	515,41	7,98	4
Tebing	72,00	4,72	798,47	12,36	5
Meral Barat	NA	NA	NA	NA	20
Belat	NA	NA	NA	NA	25
Ungar	NA	NA	NA	NA	22
JUMLAH	1.524,00	19,09	6.460,00	80,91	249

Sumber : Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun TA. 2017

Sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Karimun memiliki 249 buah pulau yang seluruhnya sudah memiliki nama, namun baru sebanyak 39 pulau di antaranya yang sudah berpenghuni. Dua pulau terbesar di wilayah ini menjadi sentra berbagai kegiatan ekonomi masyarakat dan juga pemukiman penduduk, yaitu Pulau Karimun dan Pulau Kundur.

2. KONDISI DEMOGRAFIS

Jumlah penduduk Kabupaten Karimun pada semester II tahun 2017 menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun yang mengadakan registrasi penduduk dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) berjumlah 240.170 jiwa, yang terdiri dari 123.791 laki-laki dan 116.379 perempuan. Meskipun penduduk Kabupaten Karimun berasal dari berbagai suku bangsa (heterogen), namun dari segi budaya pada umumnya didominasi oleh budaya melayu. Untuk mengetahui lebih jelasnya

jumlah penduduk Kabupaten Karimun Tahun 2011 s.d 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL I.3
JUMLAH PENDUDUK
KABUPATEN KARIMUN 2016-2021

TAHUN	PENDUDUK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
2011	272.980	141.271	131.709
2012	280.954	145.285	135.669
2013	282.475	145.996	136.479
2014	237.168	122.397	114.771
2015	237.720	122.605	115.115
2016	240.170	123.791	116.379

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2017

Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Karimun pada semester II tahun 2017 menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun adalah 71.237 KK (60.475 laki-laki dan 10.762 perempuan) tersebar di dua belas kecamatan di Kabupaten Karimun. Kecamatan dengan jumlah KK terbanyak adalah Kecamatan Karimun sebanyak 14.432 KK diikuti oleh Kecamatan Meral yaitu 12.414 KK, sedangkan Kecamatan Ungar yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit memiliki jumlah KK sebanyak 1.848 KK. Untuk mengetahui lebih jelas jumlah KK di Kabupaten Karimun pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL I.4
JUMLAH PENDUDUK DAN KEPALA KELUARGA
KABUPATEN KARIMUN MENURUT WILAYAH KECAMATAN
TAHUN 2017

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	BERDASARKAN KK		JUMLAH KK
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Moro	18.127	4.684	827	5.511
2	Durai	6.049	1.595	297	1.892
3	Kundur	30.728	7.704	1.476	9.180
4	Kundur Utara	12.547	3.190	560	3.750
5	Kundur Barat	17.667	4.680	678	5.358
6	Karimun	49.182	12.054	2.378	14.432
7	Buru	9.982	2.682	479	3.161
8	Meral	43.689	10.610	1.804	12.414
9	Tebing	25.634	6.438	1.103	7.541
10	Meral Barat	14.149	3.653	513	4.166
11	Belat	6.546	1.670	314	1.984
12	Ungar	5.870	1.515	333	1.848
TOTAL		240.170	60.475	10.762	71.237

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017

Walaupun Kabupaten Karimun masih tergolong sebagai kota kecil, namun melihat fungsi daerah ini sebagai daerah transit maka akan menimbulkan berbagai permasalahan mendasar terkait dengan kependudukan. Migrasi penduduk yang masih saja berlangsung serta besarnya persentase usia produktif di Kabupaten Karimun dapat menyebabkan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk yang pada akhirnya akan memberikan tekanan yang besar terhadap sumber daya dan daya dukung alam yang tersedia. Kedekatan Kabupaten Karimun dengan negara tetangga, Singapura dan Malaysia serta Kota Batam sebagai pusat industri ditambah lagi dengan telah ditetapkannya Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), semakin menimbulkan permasalahan-permasalahan kependudukan.

Angka pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karimun dari tahun ke tahun cukup fluktuatif, hal ini dapat dilihat pada table berikut :

TABEL I.5
ANGKA PERTUMBUHAN PENDUDUK
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2017

TAHUN	JUMLAH	ANGKA PERTUMBUHAN PENDUDUK
2012	218.475	1,03%
2013	220.882	1,10%
2014	223.117	1,01%
2015	225.298	0,98%
2016	227.277	0,88%
2017	229.194	0,89%

Sumber : BPS Karimun, Tahun 2017

3. POTENSI UNGGULAN DAERAH

a. Sektor Kelautan dan Perikanan

Peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mempengaruhi perkembangan dan pergeseran pola hidup dan budaya masyarakat, juga diikuti dengan pergeseran konsumsi kebutuhan pokok termasuk pola makan dan konsumsi bahan makanannya. Ikan sebagai salah satu konsumsi makanan pokok menjadi perhatian penting bagi masyarakat. Selain memiliki protein tinggi, mudah didapat dan dikembangkan oleh masyarakat, harganya juga relatif

murah. Maka sepantasnya apabila dalam kebijakan pemerintah Indonesia dalam Indonesia sehat 2020, bidang kelautan dan perikanan menjadi salah satu bagian penting dan strategis dalam mendukung kebijakan tersebut.

Di Kabupaten Karimun aktivitas perikanan berpotensi didorong sebagai sektor strategis yang mendukung pengembangan wilayah kepulauan terutama jika dikaitkan dengan pengembangan perekonomian masyarakat. Kegiatan perikanan kelautan yang dapat dikembangkan terdiri atas kegiatan perikanan budidaya (laut, air tawar dan air payau) dan perikanan tangkap serta pengolahan. Area tangkap yang paling potensial untuk kegiatan perikanan tangkap adalah pada gugusan Pulau Sugi, Combol, dan Perairan Rukau (Kecamatan Moro dan Durai) karena dukungan ekosistem pesisir yang sangat sesuai untuk berkembangnya biota laut.

Sejauh ini aktivitas penangkapan ikan masih dilakukan secara tradisional dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Adapun jumlah armada penangkapan ikan yang dimiliki Kabupaten Karimun tiap kecamatan disajikan pada tabel I.6;

TABEL I.6.
JUMLAH ARMADA PENANGKAPAN PERIKANAN
PER KECAMATAN KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2017

NO	KECAMATAN	JUMLAH ARMADA (UNIT)						JLH (UNIT)
		PTM	PERAHU BERMOTOR	MOTOR TEMPEL	< 5 GT	5-30 GT	>30 GT	
1	Karimun	104	110	13	131	40	0	387
2	Meral	84	74	15	223	203	123	713
3	Tebing	146	86	104	205	1	0	525
4	Buru	88	281	22	197	15	0	591
5	Kundur	56	50	6	21	0	0	133
6	Kundur Barat	37	289	3	70	0	0	398
7	Kundur Utara	231	37	5	92	1	0	366
8	Moro	437	525	184	877	51	17	2096
9	Durai	93	117	7	221	0	0	438
10	Meral Barat	179	44	37	228	0	0	484
11	Belat	136	47	0	55	0	0	238
12	Ungar	70	184	5	73	0	0	318
JUMLAH		1661	1844	401	2393	311	140	6750

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2017

Adapun untuk kegiatan budidaya tambak di Kabupaten Karimun tersebar di pesisir pulau-pulau besar serta memiliki sungai yang bermuara di daerah pesisir seperti Pulau Kundur, Pulau Belat, Pulau Sugi, Pulau Papan serta

Pulau Manda, untuk pengembangan keramba jaring apung, wilayah yang paling potensial untuk dikembangkan adalah perairan Desa Selat Mie dan Keban, Kecamatan Moro. Hal tersebut didukung oleh keberadaan investor swasta, PT. Indomarine, yang telah mengembangkan budidaya ikan kakap dan kerapu dengan sistem keramba jaring apung dengan luas areal perairan 5 Ha (sesuai dengan surat izin budidaya perikanan (SIBP) Tahun 2012).

Untuk potensi unggulan sektor perikanan berupa Produksi dan Ekspor Produk Perikanan akan dijelaskan pada Bab III, yang menjadi Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.

b. Sektor Pertanian

1) Pertanian Tanaman Pangan

Tanaman pangan unggulan Kabupaten Karimun meliputi ubi kayu, ubi jalar dan kacang tanah. Ketiga jenis tanaman pangan tersebut diusahakan secara merata hampir diseluruh Wilayah Kabupaten Karimun kecuali di Kecamatan Durai. Produktivitas tanaman pangan pada tahun 2015 rata-rata mengalami peningkatan kecuali Kacang Tanah. Sedangkan untuk tanaman padi dan jagung akan dijelaskan pada bab III sebagai Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.7

TABEL I.7
PRODUKTIFITAS TANAMAN PANGAN
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2016 s.d 2017
(KUINTAL PER Ha)

KECAMATAN	UBI KAYU		UBI JALAR		KACANG TANAH	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Moro	-	-	-	-	-	-
Durai	-	-	-	-	-	-
Kundur	215.13	217.20	-	-	-	-
Kundur Utara	200.35	220.15	-	-	6.25	5,50
Kundur Barat	248.62	253.25	80.00	81.15	-	-
Karimun	-	-	-	-	-	-
Buru	240.45	243.15	-	-	-	-
Meral	200.25	203.45	-	-	-	-
Tebing	245.30	250.35	-	-	-	-
Meral Barat	202.53	225.15	-	-	-	-
Belat	203.50	210.25	50.00	52.35	-	-
Ungar	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	1756.13	1822,95	130.00	133.50	6.25	5.50

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karimun, Tahun 2017

Pertanian tanaman perkebunan yang banyak diusahakan di Kabupaten Karimun diantaranya adalah cengkeh, kopi, lada dan gambir. Jenis usaha yang diusahakan di Kabupaten Karimun seluruhnya merupakan perkebunan rakyat. Jenis tanaman yang menjadi primadona dikalangan petani perkebunan adalah tanaman karet dan kelapa, namun tidak diuraikan dalam bab ini dikarenakan tanaman ini merupakan Indikator Kinerja Pemda Karimun dan akan dijelaskan pada bab III. Daerah penghasil utama kedua jenis tanaman ini terdapat di Pulau Kundur. Pada tahun 2016 hasil komoditas perkebunan di Kabupaten Karimun relatif menurun dibandingkan pada tahun sebelumnya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 1.8
PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT
MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2015 s.d 2016 (Ton)

KECAMATAN	CENGKEH		KOPI		LADA		GAMBIR	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Moro	-	-	-	-	-	-	-	-
Durai	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundur	-	-	-	-	-	-	3,28	-
Kundur Utara	-	-	-	-	0,8	0,1	30,42	13,5
Kundur Barat	-	-	-	-	-	-	89	-
Karimun	-	-	-	-	-	-	-	-
Buru	-	-	-	-	-	-	-	-
Meral	-	-	-	-	-	-	-	-
Tebing	-	-	-	-	-	-	-	-
Meral Barat	-	-	-	-	-	-	8,58	-
Belat	-	-	-	-	-	-	-	4,94
Ungar	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	-	-	-	-	0,8	0,1	131,28	18,44

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karimun Tahun 2017

2). Peternakan

Salah satu sasaran pembangunan sub sektor peternakan adalah untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam usaha memperbaiki gizi masyarakat. Pada tahun 2016 populasi ternak besar tercatat adalah sapi dan kambing, namun ternak ini akan dijelaskan pada bab III sebagai Indikator Kinerja Pemda Karimun. Sementara itu pada jenis ternak unggas, jumlah ternak yang diusahakan pada tahun 2016, tercatat jenis ayam ras pedaging sebanyak 63.750 ekor, ayam ras petelur 99.200 ekor, ayam kampung 35.751 ekor dan

itik 1.218 ekor. Populasi ternak unggas mengalami peningkatan untuk ternak ayam ras petelur sedangkan ternak unggas lainnya mengalami penurunan. Penurunan populasi ternak unggas disebabkan karena tingginya harga pakan ternak, sehingga biaya yang dikeluarkan tidak sesuai dengan keuntungan yang didapat oleh para peternak. Berikut adalah tabel populasi ternak unggas menurut jenis dan kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2015 s.d 2016.

TABEL 1.9
POPULASI TERNAK UNGGAS
MENURUT JENIS DAN KECAMATAN
DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015 s.d 2016

KECAMA TAN	AYAM RAS PEDAGING		AYAM RAS PETELUR		AYAM KAMPUNG		ITIK	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Moro	-	1.750	345	-	563	22.969	-	68
Durai	300	-	-	-	224	650	-	-
Kundur	35.400	40.500	47.000	65.200	79.500	540	800	200
Kundur Utara	1.900	4.000	24.000	12.000	870	882	-	120
Kundur Barat	21.200	3.500	9.500	22.000	1.400	8.500	1.317	400
Karimun	400	-	-	-	595	345	-	30
Buru	-	-	155	-	704	501	24	280
Meral	33.500	-	-	-	570	-	20	-
Tebing	12.000	14.000	-	-	300	60	80	50
Meral Barat	25.000	-	-	-	320	-	60	-
Ungar	5000	-	-	-	400	-	500	-
Belat	300	-	-	-	40	550	-	-
JUMLAH/ TOTAL	135.000	63.750	81.000	99.200	85.536	35.751	2.801	1.218

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karimun, Tahun 2017

c. Sektor Industri

Pembangunan sektor industri di Kabupaten Karimun mengalami perkembangan yang fluktuatif, disebabkan situasi perekonomian yang belum mendukung untuk menjadikan iklim usaha yang kondusif. Perkembangan kinerja sektor industri dapat dilihat dari perkembangan unit usaha, penyerapan tenaga kerja, nilai investasi, nilai produksi, dan sumbangan terhadap PDRB.

Perkembangan sektor industri Kabupaten Karimun pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 1,91 persen apabila dibandingkan dengan

tahun 2016 yaitu dari 1025 unit usaha menjadi 1045 unit usaha. Unit usaha tersebut meliputi industri pangan, sandang, kimia dan bahan bangunan, logam serta industri kerajinan, dengan jumlah unit usaha terbanyak adalah industri pangan kemudian diikuti industri kerajinan. Perkembangan sektor industri dapat dilihat dalam tabel berikut :

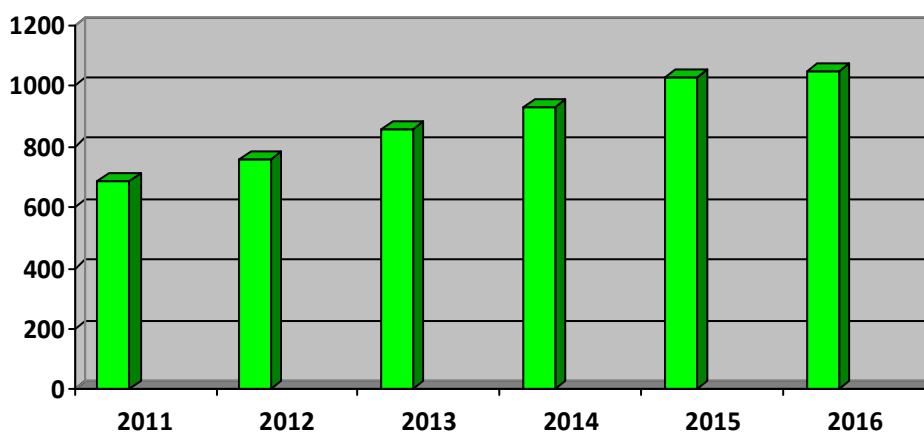
TABEL I.10
PERKEMBANGAN UNIT USAHA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2016 s.d 2021

TAHUN	UNIT USAHA	PERKEMBANGAN (%)
2011	687	2,76
2012	758	9,36
2013	858	11,65
2014	931	10,83
2015	1025	9,17
2016	1045	1,91

Sumber : Dinas Perindustriaan dan Perdagangan Kabupaten Karimun TA. 2017

Pengembangan industri kreatif sebagai salah satu jenis ekonomi kreatif dalam rangka antisipasi krisis keuangan global sangat diperlukan, karena cukup memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, menciptakan iklim bisnis yang positif, membangun citra dan identitas bangsa, berbasis pada sumber daya manusia yang terbarukan, menciptakan inovasi dan kreasi yang merupakan keunggulan kompetitif suatu daerah.

GRAFIK 1.1
PERTUMBUHAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2011 s.d 2016



d. Perdagangan Luar Negeri

Data ekspor Kabupaten Karimun pada tahun 2017 mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2016 yaitu sebesar 3,73 persen. Sedangkan untuk data impor Kabupaten Karimun tahun 2017 dibanding dengan tahun sebelumnya juga mengalami peningkatan sebesar 12,38 persen. Jika membandingkan besaran nilai ekspor dengan impor bisa disimpulkan bahwa Kabupaten Karimun mengalami defisit neraca perdagangan tahun 2017. Kenaikan pada nilai ekspor dikarenakan pada tahun 2016, nilai dollar yang menguat dibanding nilai rupiah. Hal ini juga yang menyebabkan para eksportir lebih bergairah untuk melakukan ekspor barang.

TABEL 1.11
DATA EKSPOR IMPOR
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2016-2017 (US\$)

URAIAN	TAHUN			PENINGKATAN (%)
	2015	2016*	2016*	
EKSPOR	333.427.985	345.884.759	345.884.759	3.73
IMPOR	509.746.086	572.876.655	572.876.655	12.38

**) perhitungan nilai dari bulan januari-oktober 2017*

Sumber : BPS Kabupaten Karimun Tahun 2018

4. APARAT PEMERINTAH

Keadaan Aparat Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sampai dengan bulan januari tahun 2017 sejumlah 3.823 orang yang terdiri dari : Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut :

- a. Golongan I sebanyak 77 (Tujuh Puluh Tujuh) orang, Golongan II sebanyak 986 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam) orang, Golongan III sebanyak 2.165 (Dua Ribu Seratus Enam Puluh Lima) orang dan Golongan IV sebanyak 595 (Lima Ratus Sembilan Puluh Lima) orang
- b. Jabatan Struktural yang terdiri dari Eselon II sebanyak 30 (Tiga Puluh) orang, Eselon III sebanyak 158 (Seratus Lima Puluh Delapan) orang, Eselon IV sebanyak 510 (Lima Ratus Sepuluh) orang, Eselon V sebanyak 4 (Empat) orang
- c. Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Tenaga Guru sebanyak 1.570 (Seribu Lima Ratus Tujuh Puluh) orang, Tenaga Kesehatan sebanyak 425 (Empat Ratus

Dua Puluh Lima) orang dan Tenaga Teknis/Administrasi lainnya sebanyak 1.126 (Seribu Seratus Dua Puluh Enam) orang.

d. Tingkat Pendidikan terdiri dari SD sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua) orang, SMP sebanyak 62 (Enam Puluh Dua) Orang, SMA/D1 sebanyak 813 (Delapan Ratus Tiga Belas) orang, D2 sebanyak 167 (Seratus Enam Puluh Tujuh) orang, D3 sebanyak 488 (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan) orang, D4/S1 sebanyak 2.084 (Dua Ribu Delapan Puluh Empat) orang, S2 sebanyak 172 (Seratus Tujuh Puluh Dua) orang, S3 sebanyak 5 (Lima) orang.

Upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Aparat Pemerintah Kabupaten Karimun telah melakukan berbagai program melalui memberikan penghargaan, pendidikan pelatihan teknis umum dan fungsional, serta pemberian hukuman dan pembinaan.

a. Pemberian Penghargaan Tahun 2017 :

- 1) Satya Lencana dengan masa kerja 10 tahun, sejumlah : 226 (Dua Ratus Dua Puluh Enam) Orang.
- 2) Satya Lencana dengan masa kerja 20 tahun, sejumlah : 29 (Dua Puluh Sembilan) Orang.
- 3) Satya Lencana dengan masa kerja 30 tahun, sejumlah : 30 (Tiga Puluh) Orang.

b. Pendidikan Pelatihan yang meliputi :

- 1) Diklatpim I : 0 (Kosong) orang
- 2) Diklatpim II : 4 (Empat) orang
- 3) Diklatpim III : 9 (Sembilan) orang
- 4) Diklatpim IV : 0 (Kosong) orang

c. Pemberian Hukuman

Pelanggaran Disiplin Pegawai sebanyak 11 (Sebelas) orang yang terdiri dari Pelanggaran disiplin pegawai tingkat ringan 0 (Kosong) orang, tingkat sedang sebanyak 0 (Kosong) orang, dan pelanggaran disiplin tingkat berat sebanyak 11 (Sebelas) orang.

5. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*) ORGANISASI

Dengan mempertimbangkan berbagai potensi, kondisi, permasalahan dan berbagai tantangan strategis yang dihadapi Kabupaten Karimun di tahun 2017, serta merujuk kepada Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021 yang telah dilaksanakan perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021. maka perlu diketahui isu strategis dan permasalahan yang berkembang di tahun 2017 yang sedang dihadapi organisasi, yaitu :

- 1) Perlunya konektivitas antar pulau untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat;
- 2) Subsektor perikanan dan perkebunan adalah subsektor utama yang perlu dikembangkan sebagai penopang kegiatan produksi rakyat;
- 3) Status Kabupaten Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dapat mendorong akselerasi pembangunan ekonomi;
- 4) Pelayanan kesehatan dan pendidikan yang belum optimal dan merata khususnya untuk daerah terpencil dengan aksesibilitas yang terbatas;
- 5) Pentingnya pengembangan teknologi dan akses terhadap informasi terkait aktivitas perikanan tangkap;
- 6) Perlunya menetapkan zonasi kawasan perikanan tangkap dan budidaya secara partisipatif;
- 7) Pentingnya menjadi yang terdepan dalam pengembangan potensi pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 8) Praktek pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengancam keseimbangan ekosistem dalam jangka panjang;
- 9) Meningkatnya permasalahan sosial kemasyarakatan.

6. KEUANGAN DAERAH

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan yang signifikan terhadap manajemen pemerintahan di daerah, yaitu desentralisasi dipandang sebagai suatu usaha untuk melanjutkan reformasi dan revitalisasi pengelolaan keuangan daerah. APBD harus dikelola secara lebih transparan, partisipatif dan akuntabel. Prinsip pengelolaan APBD secara akuntabel menuntut kepala daerah mempertanggungjawabkan semua program dan kegiatan dalam bentuk laporan keuangan dan laporan kinerja. Kedua laporan tersebut harus dapat

dipertanggungjawabkan kewajarannya melalui revidi, audit dan evaluasi terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang berkompeten sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain aspek akuntabilitas, asas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah aspek keterbukaan. Hal ini menuntut Pemda untuk dapat memberikan akses informasi kepada pihak-pihak berkepentingan termasuk masyarakat luas baik mengenai proses penyusunan maupun pasca laporan keuangan diterbitkan dengan mengumumkan seluas-luasnya kepada publik seperti menerbitkan laporan keuangan di media massa. Laporan keuangan yang memadai juga sangat dibutuhkan oleh para investor, baik investor asing maupun domestik. Laporan keuangan tersebut dapat menjadi sarana komunikasi bagi Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan asas partisipasi lebih difokuskan dalam penyusunan kegiatan dan program yang akan dilaksanakan yang termuat dalam APBD melibatkan masyarakat sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, menunjukkan bahwa realisasi anggaran pendapatan daerah tahun 2017 sebesar 1.197.527.195.016,47 mengalami peningkatan sebesar Rp 16.046.152.405,47 atau sebesar %, jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2016 sebesar Rp. 1.188.153.862.525,84 untuk realisasi belanja tahun 2017 sebesar Rp mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.188.951.657.800,00 atau sebesar % dari realisasi belanja tahun 2016 sebesar Rp. 1.078.713.895.481,51.

Jumlah anggaran *pembiayaan netto* Tahun 2017 adalah sebesar Rp 136.560.027.077,48 yang merupakan selisih antara anggaran penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang terjadi selama tahun 2017. Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Karimun untuk Tahun 2017 sebesar Rp. 136.560.027.077,48 yang berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun lalu (akhir Tahun 2016). Sementara anggaran pengeluaran pembiayaan untuk Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 0,00.

Jumlah SiLPA untuk akhir Tahun Anggaran 2017 (*unaudited*) adalah Rp.313.564.193,00 yang merupakan selisih lebih selama satu periode pelaporan (yakni Tahun Anggaran 2017) antara lain:

- 1) Realisasi pendapatan sebesar Rp. 1.116.093.509.132,83 yang mencakup: Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 394.646.942.116,83 dan Pendapatan transfer sebesar Rp. 685.627.617.016,00 dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp 35.818.950.000,000
- 2) Realisasi belanja sebesar Rp 1.188.951.657.800,00 yang mencakup : Belanja Operasi sebesar Rp. 991.648.643.803,00 belanja modal sebesar Rp. 196.100.353.722,00, belanja tidak terduga sebesar Rp. 1.202.660.275,00 dan transfer bantuan keuangan sebesar Rp. 48.500.000,00
- 3) Realisasi pembiayaan netto sebesar Rp.136.560.027.077,48.

7. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam penulisan laporan ini Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang digunakan adalah :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
2. Peraturan Bupati Karimun Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat DPRD Tipe B.
3. Peraturan Bupati Karimun Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah Tipe A .
4. Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah.
5. Peraturan Bupati Karimun Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah.
6. Peraturan Bupati Karimun Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kecamatan.

Struktur Organisasi dan tata kerja (SOTK) dilingkungan pemerintah kabupaten Karimun di bentuk berdasarkan pada peraturan pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun serta upaya mendukung peningkatan pelayanan publik.

Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat Daerah
- d. Dinas, terdiri dari :
 - 1) Dinas Pendidikan
 - 2) Dinas Kesehatan
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 4) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Kebersihan
 - 5) Dinas Sosial
 - 6) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 7) Dinas Lingkungan Hidup
 - 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 9) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 10) Dinas Perhubungan
 - 11) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 12) Dinas Kepemudaan dan Olahraga
 - 13) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
 - 14) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - 15) Dinas Perikanan
 - 16) Dinas Pangan dan Pertanian
 - 17) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral
 - 18) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
- e. Lembaga Teknis, terdiri dari :
 - 1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
 - 2) Badan Pendapatan Daerah
 - 3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 6) Satuan Polisi Pamong Praja
 - 7) Rumah Sakit Umum Daerah.
- f. Kecamatan berjumlah 12 Kecamatan dan 29 Kelurahan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN KINERJA 2017

Adanya pola pikir yang terukur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, dan budaya, diperlukan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dan pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju pemerintah yang bersih, berwibawa, dan akuntabel.

Atas dasar ini, Pemerintah Kabupaten Karimun pada setiap akhir periode menyusun laporan pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja dalam wujud Laporan Kinerja yang dikomunikasikan kepada para stakeholders dan pada hakekatnya adalah merupakan "Pertanggungjawaban Publik".

Laporan Kinerja selain memiliki fungsi sebagai penyediaan informasi untuk mengambil keputusan pihak-pihak terkait, juga sebagai umpan balik dan sebagai sarana perbaikan manajemen pemerintahan, serta sebagai media pertanggungjawaban kepada lembaga legislatif dan publik. Fungsi tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Kabupaten Karimun.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2017 mencakup hal-hal berikut ini :

1. Memberi pertanggungjawaban kepada pemberi amanah
2. Memberi dasar bagi pengambil keputusan untuk perbaikan dalam pencapaian kehematan, efesiensi, dan efektifitas pelaksanaan tupoksi, sebagai upaya mencapai visi dan misi Kabupaten Karimun tahun 2016-2021
3. Memberi masukan untuk memperbaiki perencanaan khususnya jangka pendek dan jangka menengah.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

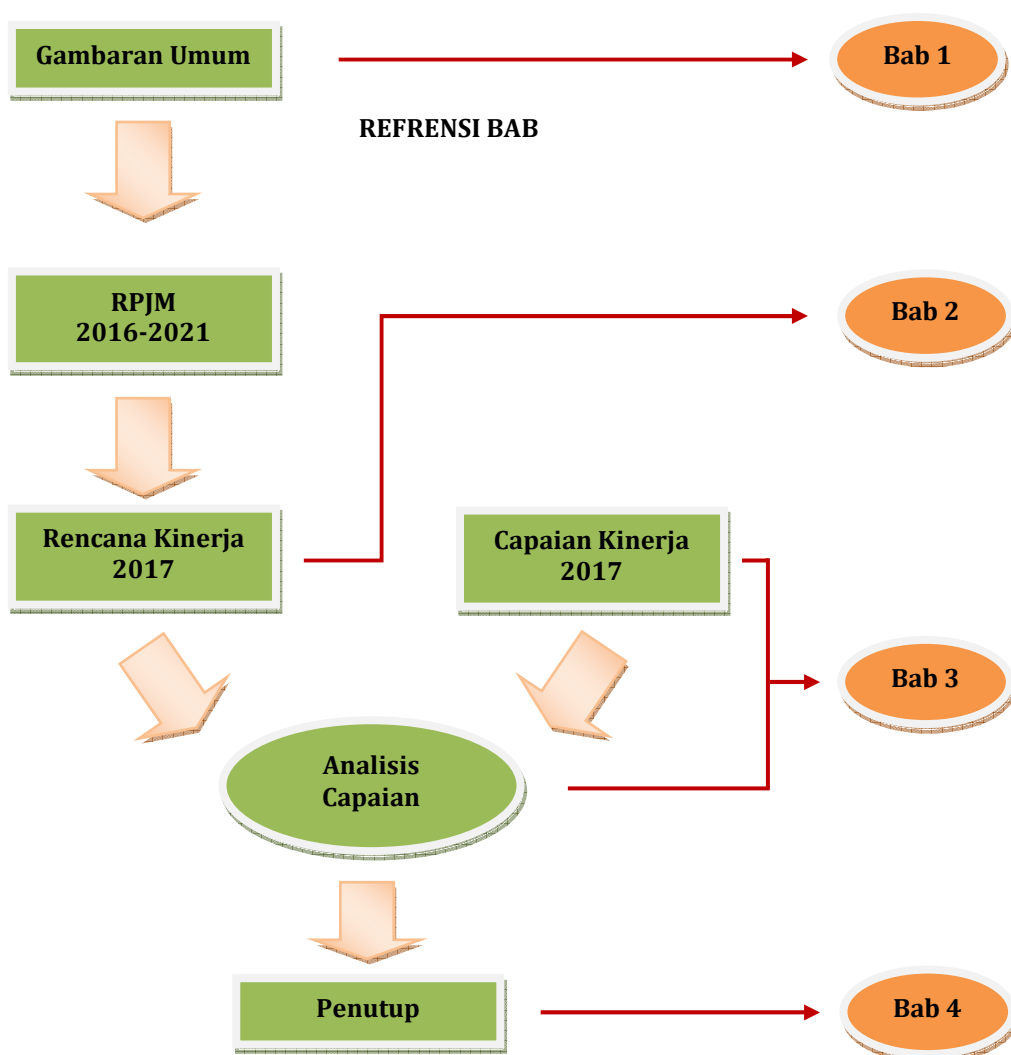
Dalam laporan ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2017. Strategis di sini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk

membiayai kegiatan, tidak termasuk biaya yang bersifat penunjang. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator *input*, *output*, dan *outcome*.

Laporan kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun selama tahun 2017. Capaian kinerja (*performance results*) 2017 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plans*) 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gaps*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kabupaten Karimun tahun 2017 diilustrasikan pada gambar berikut ini :

GAMBAR 1.12
SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2017



Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, menjelaskan gambaran umum Pemerintah Kabupaten Karimun, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja, landasan hukum, serta sistematika pembahasan.
- Bab II : Rencana Strategik, menjelaskan rencana strategik Pemerintah Kabupaten Karimun untuk periode 2016–2021 dan Rencana Kinerja Tahun 2017, dan menjelaskan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun untuk tahun 2017.
- Bab III : Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun secara makro dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian kinerja hasil pembangunan untuk tahun 2017.
- Bab IV : Penutup, menjelaskan simpulan kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2017 dan saran perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Daerah merupakan langkah awal pencapaian tujuan jangka menengah lima tahunan yang pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, yang diwujudkan dalam suatu dokumen perencanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun, melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintahan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2016-2021.

1. VISI PEMBANGUNAN DAERAH

Visi Pemerintah Kabupaten Karimun yang merupakan Visi Bupati Karimun yang ingin diwujudkan dalam rangka memantapkan landasan pembangunan Kabupaten Karimun tahun 2016-2021, yaitu: **“Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Petumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim yang Terdepan Berlandaskan Iman dan Taqwa”**.

2. MISI PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk merealisasikan dan mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun, Kepala Daerah Kabupaten Karimun menetapkan misi pembangunan Kabupaten Karimun untuk Tahun 2016–2021, sebagai berikut :

1. Mengembangkan pusat pertumbuhan yang handal dan berdaya saing melalui kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
(TERDEPAN DALAM DAYA SAING)

2. Membangun ekonomi kerakyatan yang tangguh berbasis sumber daya maritim dan pertanian. (TERDEPAN DALAM BIDANG EKONOMI);
3. Memperkuat konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan. (TERDEPAN DALAM INFRASTRUKTUR);
4. Membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan kompetitif serta menjawab kebutuhan daerah. (TERDEPAN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN);
5. Menjaga fungsi dan kelestarian lingkungan hidup. (TERDEPAN DALAM MELESTARIKAN LINGKUNGAN HIDUP);
6. Membangun masyarakat yang berbudaya berlandaskan iman dan taqwa. (TERDEPAN DALAM BUDAYA DAN KEAGAMAAN);
7. Mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih, dan melayani (TERDEPAN DALAM PELAYANAN BIROKRASI).

Untuk mewujudkan visi, misi dan prioritas pembangunan tersebut juga dijunjung slogan “**BERSIH**” yaitu; **Beriman, Sehat, Indah dan Harmonis**. Bersih dalam hal ini baik secara lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, baik bersih dalam dimensi lahir maupun bathin. dimana untuk menuju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terdepan pasti memiliki dampak lingkungan baik fisik maupun sosial, sehingga Kabupaten Karimun harus dibawa untuk mempersiapkan diri baik secara fisik, sosial maupun landasan spiritual.

Untuk melaksanakan slogan tersebut maka telah ditetapkan pula 4(empat) azam sebagai motor penggerak pembangunan yaitu:

Azam Peningkatan Iman dan Taqwa

Dimaksudkan sebagai upaya untuk menanamkan sikap mental berbudi luhur dan berakhlak mulia serta memiliki sandaran vertikal yang kokoh sehingga pelaksanaan pembangunan akan lebih terarah dan bertanggung jawab.

Azam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Dimaksudkan sebagai upaya untuk menyiapkan SDM yang berkualitas, sehingga mampu menggali dan mengembangkan asset dan potensi yang ada.

Azam Pembangunan Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan

Dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, antara lain melalui peningkatan sarana dan

produksi, sehingga pertumbuhan ekonomi berlangsung secara sinergis dengan pemerataan pendapatan.

Azam Pengembangan Seni dan Budaya

Dimaksudkan sebagai upaya menggali khazanah budaya Melayu yang merupakan ciri khas daerah sehingga mampu mempertahankan kepribadian dengan nilai luhur bangsa dari pengaruh dan tantangan yang datang dari luar.

3. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan target yang dalam penetapannya mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki dengan indikator keberhasilan yang terukur.

Tingkat pencapaian tujuan merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pelaksanaan dari perencanaan kinerja lima tahunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD (*performance indicator*). Untuk itu tujuan mempunyai posisi strategis dalam pencapaian visi dan misi yang dalam kurun waktu 2016-2021 Pemerintah Kabupaten Karimun mengelompokkan atas 8 (Delapan) tujuan sebagai berikut :

TABEL 2.1
PENGELOMPOKAN MISI DAN TUJUAN

MISI	TUJUAN
PERTAMA	1. Pertumbuhan ekonomi
KEDUA	2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis maritim pertanian
	3. Mengembangkan potensi wisata
KETIGA	4. Menghubungkan antar wilayah dengan infrastruktur yang andal dalam mengembangkan kawasan pusat pertumbuhan
KEEMPAT	5. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas guna menekan kemiskinan dan kesenjangan sosial
KELIMA	6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
KEENAM	7. Meningkatkan pelestarian budaya lokal dan kehidupan beragama dalam bermasyarakat
KETUJUH	8. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) melalui pemantapan reformasi birokrasi

4. SASARAN

Sasaran yang dimaksud di sini adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu, yang merupakan penjabaran dari tujuan. Penetapan sasaran didasari atas isu-isu strategis, analisis lingkungan internal dan eksternal, untuk menentukan faktor kunci keberhasilan, sejalan dengan proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi dana dan sumber daya ke dalam kegiatan atau operasional untuk pencapaian kinerja yang diinginkan. Dalam penetapan sasaran juga dirancang dan diidentifikasi indikator pencapaiannya, yaitu suatu ukuran tingkat keberhasilan perwujudan pencapaiannya pada periode tahun tertentu. Setiap indikator pencapaian sasaran disertai dengan targetnya masing-masing.

Penetapan indikator sasaran Pemerintah Kabupaten Karimun, baik yang bersifat makro maupun mikro, diharapkan dapat memberikan fokus pada penentuan strategi dan prioritas dalam menetapkan kebijakan-kebijakan dan program-program pilihan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan, visi dan misi Kabupaten Karimun.

Adapun sasaran strategis yang merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur pada tahun 2017 sebagai ukuran kinerja utama Pemerintah Kabupaten Karimun dan sejalan dengan RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021, dengan uraian sebagai berikut :

TABEL 2.2
PENGELOMPOKAN TUJUAN DAN SASARAN KINERJA

TUJUAN	SASARAN TAHUN 2017
Pertumbuhan ekonomi	1. Meningkatnya aktivitas ekonomi dipusat pertumbuhan ekonomi baru
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis maritim dan pertanian	2. Memantapkan kewirausahaan petani dan nelayan 3. Meningkatnya produktivitas dan produksi sektor pertanian dan perikanan 4. Tercapainya konsumsi energi pangan
Mengembangkan potensi wisata	5. Terwujudnya Karimun sebagai daerah wisata
Menghubungkan antar wilayah dengan infrastruktur yang andal dalam mengembangkan kawasan pusat pertumbuhan	6. Meningkatnya sarana dan prasarana penghubung antar wilayah 7. Meningkatnya pemerataan infrastruktur dasar

Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas guna menekan kemiskinan dan kesenjangan sosial	8. 9. 10. 11. 12. 13.	Menurunnya penduduk miskin dan ketimpangan antar wilayah Meningkatnya derajat kesehatan Meningkatnya kualitas pendidikan Meningkatnya pertumbuhan tenaga kerja lokal Meningkatnya keberdayaan perempuan dan kesetaraan gender Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	14. 15.	Terwujudnya pola dan struktur ruang yang sesuai dengan tata ruang wilayah Terjaganya kelestarian lingkungan hidup
Meningkatkan pelestarian budaya lokal dan kehidupan beragama dalam bermasyarakat	16.	Meningkatnya aktivitas - aktivitas keagamaan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) melalui pemantapan reformasi birokrasi	17. 18.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah Meningkatnya kualitas pelayanan

B. RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja Pemerintah Kabupten Karimun 2017 yang dijabarkan dari RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021 merupakan dokumen kesepakatan antara pihak pemberi dan penerima amanat tentang tingkat kinerja dari suatu indikator yang telah ditentukan, dan harus dicapai dalam Tahun Anggaran 2017.

Tahun 2017 merupakan tahun ke 18 (delapan belas) pemerintah Kabupaten Karimun dan merupakan tahun ke 1 (kesatu) dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Karimun 2016-2021. Mencermati arah dan kebijakan pada RPJMD Kabupaten Karimun 2016-2021 maka pada tahun 2017 disusun 5 (Lima) prioritas pembangunan sebagai penjabaran dari RPJMD, dimana keenam prioritas pembangunan tersebut yang menjadi fokus pada tahun 2017 ini merupakan aspirasi yang berkembang di masyarakat pada saat Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten. Dari tema pembangunan Nasional dan tema pembangunan provinsi, serta prioritas pembangunan dari masing-masing tingkatan pemerintahan,

maka Kabupaten Karimun menetapkan tema pembangunan tahun 2017 adalah Mempercepat pembangunan infrastruktur dan ekonomi berbasis maritim untuk melanjutkan pembangunan yang berkualitas dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Prioritas Pertama : Percepatan pembangunan infrastruktur dalam
2. Prioritas Kedua : Peningkatan aksebelitas terhadap layanan air bersih bagi masyarakat .
3. Prioritas Ketiga : Peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan perluasan akses terhadap lapangan pekerjaan.
4. Prioritas Keempat : Peningkatan kualitas pelayanan publik termasuk sektor pendidikan dan kesehatan.
5. Prioritas Kelima : Peningkatan sektor pariwisata, pertanian, kemaritiman dan perikanan sebagai basis ekonomi kerakyatan.

Selanjutnya dari kelima prioritas Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Karimun tahun 2017 maka disusun arah dan sasaran kegiatan pokok pembangunan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2017 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2017.

Adapun program-program yang mendukung sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun dalam kurun waktu selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

TABEL 2.3
PROGRAM YANG MENDUKUNG SASARAN KINERJA

SASARAN TAHUN 2017	PROGRAM
Meningkatnya aktivitas ekonomi di pusat pertumbuhan ekonomi baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan dan pengembangan ekspor 2. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 3. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 4. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 5. Program perencanaan pembangunan
Memantapkan kewirausahaan petani dan nelayan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan sarana dan prasarana pertanian 2. Program pemberdayaan masyarakat pesisir

	3.	Program pengembangan industri kecil dan menengah
Meningkatnya produktivitas dan produksi sektor pertanian dan perikanan	1. 2. 3. 4.	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) Program pengembangan budidaya perikanan Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran
Tercapainya konsumsi energi pangan	1. 2.	Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) Program peningkatan ketersediaan, akses dan distribusi pangan
Meningkatnya sarana dan prasarana penghubung antar wilayah	1. 2. 3. 4.	Program pembangunan jalan dan jembatan Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Dasar	1. 2. 3. 4.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program pembangunan jalan dan jembatan Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Menurunnya penduduk miskin	1.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Meningkatnya Derajat Kesehatan	1. 2. 3. 4.	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1. 2.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Non Formal
Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal	1. 2.	Program Peningkatan Kesempatan dan Perluasan Kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas tenaga kerja
Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender	1.	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
Terkendalinya laju Pertumbuhan Penduduk	1. 2.	Program Pendaftaran dan Imigrasi Penduduk Program Keluarga Berencana

Terwujudnya Pola dan struktur ruang yang sesuai dengan tata Ruang wilayah	1.	Program Pemanfaatan Ruang Program pengembangan
Terjaganya kelestarian lingkungan hidup	1. 2. 3.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah Program peningkatan ruang terbuka hijau
	4.	(RTH). Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
Meningkatnya aktivitas-aktivitas keagamaan	1.	Program Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan.
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah	1. 2.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Meningkatnya kualitas pelayanan	1.	Program pembinaan dan pengembangan Aparatur.

C. PERJANJIAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja, maka untuk tahun 2017 pelaporan kinerja telah diperbaiki dengan terbitnya perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara Reviu atas laporan kinerja sebagai perubahan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Pemerintah Kabupaten Karimun untuk mencapai tujuan strategis telah menerapkan tata laksananya dengan baik meliputi 18 (delapan belas) sasaran strategis. Delapan belas sasaran strategis tersebut dimuat dalam sebuah dokumen Perjanjian Kinerja sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi.

Dokumen perjanjian kinerja memuat sasaran strategis berupa terwujudnya penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien, efektif, dan akuntabel yang diukur dengan 50 (lima puluh) indikator kinerja sebagai berikut:

TABEL 2.4
PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2017

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2017	INSTANSI
1.	Meningkatnya aktivitas ekonomi di pusat pertumbuhan ekonomi baru	1. Nilai ekspor (USD)	1.300.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral
		2. Nilai investasi (Rp)	Rp. 21.6 Tryliun	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		3. Jumlah kawasan strategis	4 Kawasan Strategis	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Kebersihan
2.	Memantapkan kewirausahaan petani dan nelayan	1. Nilai kredit dari perbankan yang tersalurkan untuk petani dan nelayan (Rp)	2.000.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral
		2. Persentase petani dan nelayan yang menerima kredit	65%	Dinas Pangan dan Pertanian Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral
3.	Meningkatkan produktivitas dan produksi sektor pertanian dan perikanan	1. Jumlah produksi tanaman pangan dan perkebunan (Ton/Tahun) - Padi - Jagung - Karet - Kelapa	150 270 3.650 800	Dinas Pangan dan Pertanian

		2. Produktivitas komoditas tanaman pangan dan perkebunan (Ton/Ha) - Padi - Jagung - Karet - Kelapa	2.3 2.8 0.34 0.60	Dinas Pangan dan Pertanian
		3. Jumlah produksi produk perikanan (ton)	50.000 Ton	Dinas perikanan
		4. Jumlah ekspor produk perikanan (ton)	6.800 Ton	Dinas perikanan
4.	Tercapainya konsumsi energi pangan	1. Konsumsi energi perkapita (Kal/Hari/Kap)	1940	Dinas Pangan dan Pertanian
5.	Terwujudnya Karimun sebagai daerah wisata	1. Jumlah kunjungan wisatawan asing	101.796 orang	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		2. Rata-rata lama wisatawan menginap	1.2 hari	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
6.	Meningkatnya sarana dan prasarana penghubung antar wilayah	1. Panjang jalan terhubung antar wilayah dalam kondisi baik	537.98 km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2. Jumlah titik akses penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk minimal dilalui roda 4	953 titik	Dinas Pekerj Umum dan Penataan Ruang
		3. Persentase pulau berpenghuni yang terjangkau transportasi laut reguler	31,42%	Dinas Perhubungan
		4. Persentase pelabuhan laut yang memadai	79,82%	Dinas Perhubungan
7.	Meningkatnya pemerataan infrastruktur dasar	1. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	50,23%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

		2. Proporsi panjang jaringan jalan aspal dalam kondisi baik	54.31 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		3. Persentase wilayah terlayani jaringan Komunikasi	85 %	Bagian Humas Setda Karimun
8.	Menurunnya penduduk miskin	1. Persentase penduduk miskin	6.72 %	Dinas Sosial
9.	Meningkatnya derajat kesehatan	1. Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan	151 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)	Dinas Kesehatan
		2. Angka Kematian Bayi (AKB)	14 per 1.000 Kelahiran Hidup (KH)	Dinas Kesehatan
		3. Prevalensi terhadap penyakit HIV / AIDS	0,06 %	Dinas Kesehatan
10.	Meningkatnya kualitas pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B	107,00 % 101,25 %	Dinas Pendidikan
		2. Angka Partisipasi Murni (APM) - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B	97,60 % 75,00 %	Dinas Pendidikan
		3. Angka pendidikan yang ditamatkan - SD - SMP - SMA	29,16% 18,63% 22,65%	Dinas Pendidikan
		4. Angka Melek Huruf (AMH)	98,10%	Dinas Pendidikan
		5. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLs)	11,96 Tahun	Dinas Pendidikan
11.	Meningkatnya pertumbuhan tenaga kerja lokal	1. Tingkat partisipasi angkatan kerja	60.19 %	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		2. Persentase Peningkatan penerimaan tenaga kerja lokal	3.5%	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
12	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan kesetaraan gender	1. Indeks Pembangunan Gender	91.48 %	Dinas Pengendali Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

13	Terkendalnya Laju Pertumbuhan penduduk	1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0.84 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14	Terwujudnya pola dan struktur ruang yang sesuai dengan tata ruang wilayah	1. Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang	96.75 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15.	Terjaga Keselestarian Lingkungan Hidup	1. Indeks kualitas lingkungan hidup	55 - 60	Dinas Lingkungan Hidup
		2. Nilai Adipura	> 76	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Kawasan
				Pemukiman dan Kebersihan
		3. Luas ruang terbuka hijau	196.016 Ha	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Kebersihan
		4. Luas kawasan rawan bencana yang tertangani	27.5 Ha	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Kebersihan Umum dan Penataan Ruang
16.	Meningkatkan aktivitas-aktivitas keagamaan	1. Jumlah Calon jemaah haji yang mendaftar	300 Orang	Bagian Kesra Setda Karimun
		2. Jumlah muzaki	420 orang	Bagian Kesra Setda Karimun

17.	Meningkatnya transparansi dan	1. Indeks akuntabilitas	72	Bagian Organisasi dan KORPRI Setda Karimun
	akuntabilitas pemerintah	2. Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
18.	Meningkatnya kualitas pelayanan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	> 3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu RSUD Muhamad Sani

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dari penggunaan sumber daya organisasi oleh penerima amanah kepada pemberi amanah secara transparan dalam rangka pencapaian tujuan, visi dan misi organisasi yang diwujudkan dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja. Pemerintah Kabupaten Karimun selaku pengemban amanah masyarakat Karimun melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan kinerja yang disusun sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Ketentuan - ketentuan tersebut di atas menghendaki suatu laporan kinerja harus memberikan gambaran tingkat pencapaian target kegiatan dan sasaran dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, RKPD Tahun 2016, RPJMD 2011 - 2016. Penilaian tingkat pencapaian target tersebut dilaksanakan melalui pengukuran kinerja aktual dibandingkan dengan kinerja yang telah direncanakan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah Kabupaten Karimun.

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Pengukuran indikator kinerja menggunakan penghitungan persentase

pencapaian rencana tingkat capaian (target) dari masing-masing indikator kinerja sebagaimana ditetapkan melalui realisasi yang berhasil dicapai pada indikator dimaksud, maka penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik

komponen realisasi. Dalam kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN} = \frac{2 \times \text{Target} - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

1. 85 s.d. 100 = Baik Sekali
2. 70 s.d. <85 = Baik
3. 55 s.d. <70 = Cukup
4. < 55 = Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

1. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), dan hasil (*outcomes*).

2. Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

B. CAPAIAN INDIKATOR MAKRO

Tujuan pembangunan Kabupaten Karimun telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan Kabupaten Karimun telah disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sejauhmana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan itu sendiri. Adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam indikator makro pembangunan daerah. Atas dasar telah ditetapkannya indikator tersebut, maka kinerja pembangunan daerah dapat diukur, melalui informasi gambaran ketercapaian dan permasalahan yang terjadi dari setiap indikator makro. Tetapi persoalan yang perlu dicermati bersama adalah, ketercapaian setiap indikator makro tersebut merupakan akumulasi dari peran serta seluruh *stakeholder* pembangunan yang meliputi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat.

Adapun kinerja proses pembangunan Kabupaten Karimun secara umum tercermin dari beberapa variabel ekonomi makro, meliputi bidang ekonomi dan bidang sosial.

1. BIDANG EKONOMI

Perekonomian adalah salah satu unsur penting dalam kesejahteraan penduduk. Perekonomian yang baik dan mengalami pertumbuhan memberikan sumbangan penting dan berdampak positif pada peningkatan penghasilan masyarakat. Artinya, bila ekonomi semakin berkembang, semakin terbuka pula peluang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan melalui peran sertanya dalam aktivitas ekonomi. Kondisi perekonomian regional memiliki kaitan erat dengan perkembangan ekonomi nasional, bahkan situasi perkembangan

ekonomi dunia. Perubahan atau gangguan yang cukup drastis yang terjadi di negara tertentu dapat berpengaruh bahkan pada ekonomi regional. Dalam perspektif ini, maka pendapatan masyarakat di tingkat regional dapat dipengaruhi ekonomi nasional atau negara lainnya. Perkembangan kondisi umum ekonomi daerah Kabupaten Karimun yang merupakan gambaran kinerja makro dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menunjukkan perkembangan yang positif. Hal tersebut tentunya didukung oleh perkembangan kondisi nasional yang tetap memberikan warna dalam dinamika perkembangan kondisi ekonomi pada daerah-daerah di seluruh Indonesia, termasuk daerah Kabupaten Karimun.

Indikator makro bidang ekonomi yang dicapai Pemerintah Kabupaten Karimun dalam periode 2016-2021, antara lain sebagai berikut :

a. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara umum dapat digunakan untuk menggambarkan perkembangan ekonomi di suatu daerah. Dilihat dari besarnya, perkembangan PDRB Kabupaten Karimun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, PDRB Kabupaten Karimun atas dasar harga berlaku diproyeksikan mencapai Rp.10.632.290.210.000,- atau mengalami peningkatan sebesar 10,45 % dibanding dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 9.625.935.350.000,- sementara perkembangan PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2016 diproyeksikan mencapai Rp. 8.182.949.830.000,- atau meningkat sebesar 6,35 % dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai Rp. 7.693.848.330.000. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas kegiatan ekonomi di Kabupaten Karimun terus meningkat baik secara nominal maupun realitas produksinya. Adapun perkembangan besaran PDRB Kabupaten Karimun atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan tahun 2016-2021, bisa dilihat pada tabel 3.1.

TABEL 3.1
PDRB KABUPATEN KARIMUN 2016-2021 (JUTAAN RUPIAH)

TAHUN	PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (Rp)	PERTUMBUHAN	PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN (Rp)	PERTUMBUHAN
2011	6.178.038	12,61 %	5.872.368	7,04 %
2012	6.951.951	12,53 %	6.297.817	7,24 %

2013	7.733.182	11.34 %	6.744.254	7.09 %
2014	8.618.461	11,45 %	7.207.305	6.87 %
2015*	9.631.945	11.76 %	7.678.307	6,54 %
2016**	10.596.634	10.02 %	8.152.859	6,18 %

*) Angka sementara

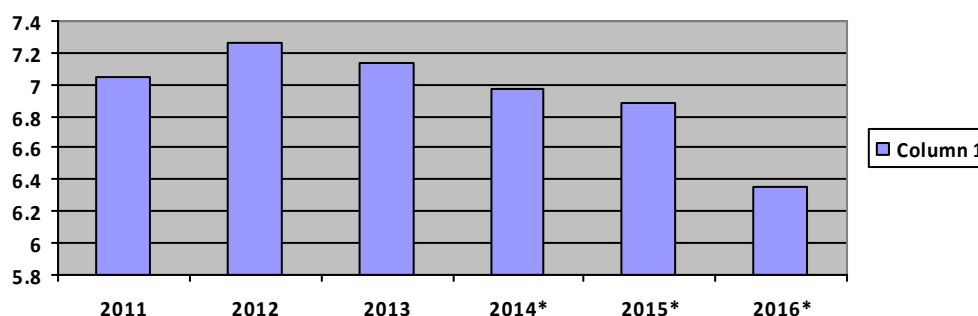
Sumber : BPS Karimun, Tahun 2018

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi oleh penduduk setempat mengalami peningkatan, sehingga kemakmuran masyarakat meningkat. Angka pertumbuhan ekonomi bisa memberikan gambaran mengenai kinerja ekonomi suatu daerah pada periode waktu tertentu. Kebijakan pemerintah daerah bisa mempengaruhi besarnya pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi bisa dijadikan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan yang telah dicapai serta berguna sebagai bahan untuk menentukan kebijakan dan arah pembangunan dimasa yang akan datang.

Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diharapkan dapat memberikan dampak pada beberapa aspek terhadap pembangunan. Pertama, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat. Kedua, kemakmuran yang meningkat dan pemerataan pendapatan masyarakat yang baik sehingga bisa meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik 3.1 berikut :

GRAFIK 3.1
PERTUMBUHAN EKONOMI (%)



*) Angka sementara

Sumber : BPS Karimun, Tahun 2018

Pada grafik di atas, dapat diketahui secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 sampai tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun berturut-turut 7,05 %, 7,26 %, 7,14 %, 6,97 %, dan 6,88 %. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun di proyeksikan mengalami penurunan kembali dibanding dengan tahun 2015 (dari 6,88 % menjadi 6,35 %).

TABEL 3.2
PERTUMBUHAN PDRB KABUPATEN KARIMUN ATAS DASAR HARGA
KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2016 – 2021

LAPANGAN USAHA	2012	2013	2014*	2015*	2016*
1. Pertanian, Kehutan dan Perikanan	5,59	5,56	5,50	5.48	5.45
2. Pertambangan & Penggalian	7,19	6,16	3,70	6.01	5.41
3. Industri Pengolahan	8,13	7,80	7,56	8,03	8.04
4. Pengadaan Listrik & Gas	5,93	0,63	4.95	5.11	5.98
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, Daur Ulang	7,97	6,62	6,53	5.88	5.94
6. Konstruksi	9,39	9,47	10.71	8.84	7.10
7. Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	7,98	8.70	7.91	6.30	6.56
8. Transportasi dan Pergudangan	10,12	11,18	11,91	9.46	9.44
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,38	5,62	6,29	6,53	6.42
10. Informasi dan Komunikasi	5,18	4,39	4,41	4,65	4.87
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	5,85	5,50	5,69	5.50	5.31
12. Real Estate	6,92	5,72	6,38	6,01	6.09
13. Jasa Perusahaan	8,11	8,32	8,72	8,74	7.02
14. Adm Pemerintahan, Pertanahan dan Jamsos Wajib	4,57	5,15	5,48	3.94	3.96
15. Jasa Pendidikan	5,26	3,97	4,59	4,40	4.31
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,92	5,88	6,92	6,21	6.07
17. Jasa Lainnya	8,27	4,75	6,86	6,53	6.13
PDRB	7,24	7,09	6.96	6.63	6.36

*) Angka sementara

Sumber : BPS Karimun, Tahun 2018

Pertumbuhan ekonomi juga bisa dilihat untuk masing-masing sektor pembentuknya (tabel 3.2). Dengan melihat masing-masing sektor, maka bisa diketahui sektor mana yang mengalami pertumbuhan meningkat dan sektor mana yang mengalami perlambatan dalam pertumbuhannya pada tahun tertentu. Hal ini bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi sejauh mana pembangunan mempengaruhi keberhasilan kinerja untuk setiap sektor ekonomi.

Perlambatan kinerja perekonomian Kabupaten Karimun yang diproyeksikan mencapai pertumbuhan sebesar 6,35 % pada tahun 2016 tidak terlepas dari penurunan pertumbuhan yang terjadi pada semua sektor penyusunnya. Dari tujuh belas sektor sebagian besar diantaranya menunjukkan pertumbuhan yang negatif, kecuali pada sektor Industri Pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah daur ulang, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, informasi dan komunikasi, real estate dan administrasi pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial wajib yang masih tetap tumbuh positif.

Pada tahun 2016 sektor ekonomi yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi terparah adalah sektor konstruksi. Pada tahun 2016 pertumbuhan pada sektor ini sebesar 7,10 % atau melambat 24,50 % dibanding tahun sebelumnya. Sektor lainnya yang mengalami perlambatan cukup besar adalah Sektor jasa perusahaan. Pertumbuhan sektor ini pada tahun 2016 diproyeksikan sebesar 7,02 %, atau mengalami perlambatan 24,50 % dibandingkan tahun 2015.

Diantara beberapa sektor yang masih mengalami percepatan pertumbuhan yaitu Sektor pengadaan listrik dan gas berada pada tempat pertama dengan pencapaian sebesar 5,98 persen. Angka ini meningkat 17,02 % dibanding tahun sebelumnya sebesar 5,11 %.

Melambatnya pertumbuhan berbagai sektor ekonomi Kabupaten Karimun Tahun 2016 tidak terlepas dari melambatnya perkembangan ekonomi global/dunia.

c. Sektor Ekonomi Dominan

Struktur ekonomi suatu daerah diukur dari peran setiap sektor/lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB. Semakin besar nilai tambah yang tercipta oleh suatu sektor ekonomi, maka peranan sektor tersebut semakin penting atau disebut juga sebagai sektor ekonomi dominan. Pada jangka pendek struktur ekonomi berguna untuk menggambarkan corak perekonomian suatu daerah, apakah daerah tersebut didominasi oleh sektor primer (tipe agraris), sekunder (tipe industri), maupun tersier (tipe keuangan dan jasa). Struktur ekonomi dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia.

Dalam jangka panjang struktur ekonomi dapat menunjukkan arah dan keberhasilan pembangunan ekonomi dengan melihat transformasi ekonomi yang terjadi dari suatu periode ke periode lainnya. Transformasi struktural dapat dideteksi dengan karakteristik turunnya peranan sektor primer yang tradisional. Sementara itu pada saat yang bersamaan, peranan sektor sekunder dan sektor tersier semakin meningkat. Dalam proses ini, pergeseran peranan harus tetap diikuti oleh pertumbuhan dari masing-masing sektor meskipun dengan laju yang berbeda.

Lebih lanjut, laju percepatan dari suatu proses transformasi akan berbeda pada setiap daerah, tergantung pada karakteristik daerah tersebut. Untuk daerah yang kaya sumber daya alam seperti Kabupaten Karimun, proses transformasinya cenderung lebih lambat dibandingkan dengan-daerah kawasan industri seperti Batam dan Bintan. Perbedaan ini terjadi karena daerah yang kaya akan sumber daya alam cenderung memerlukan pertumbuhan yang relatif tinggi pada sektor primer untuk mendukung percepatan pertumbuhan pada sektor lainnya.

TABEL 3.3
DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB KABUPATEN KARIMUN ATAS DASAR
HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA 2012-2016

LAPANGAN USAHA	2012	2013	2014*	2015*	2016*
1. Pertanian, Kehutan dan Perikanan	17,65	17,36	17,07	16,60	16,37
2. Pertambangan & Penggalian	11,93	11,67	11,22	10,97	10,74
3. Industri Pengolahan	14,33	14,37	14,20	14,32	14,45
4. Pengadaan Listrik & Gas	0,34	0,31	0,25	0,24	0,24
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
6. Konstruksi	15,08	15,55	15,96	16,18	16,12
7. Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	16,96	16,85	17,41	17,75	18,23
8. Transportasi dan Pergudangan	3,18	3,41	3,73	3,98	4,14
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,97	1,99	1,99	2,02	2,04
10. Informasi dan Komunikasi	3,09	2,94	2,79	2,70	2,60
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,70	1,68	1,66	1,67	1,67
12. Real Estate	3,19	3,15	3,15	3,15	3,13
13. Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
14. Adm Pemerintahan, Pertanahan dan Jamsos Wajib	3,85	4,06	4,01	3,92	3,83
15. Jasa Pendidikan	3,53	3,47	3,36	3,30	3,26
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,62	1,63	1,62	1,61	1,62
17. Jasa Lainnya	1,52	1,52	1,51	1,53	1,52
PDRB	100	100	100	100	100

*) Angka sementara

Sumber : BPS Karimun, Tahun 2018

Berdasarkan tabel 3.3 di atas terlihat bahwa pada periode 2012-2016 struktur perekonomian Karimun masih didominasi oleh 5 (lima) sektor, yaitu: sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor, konstruksi, pertanian kehutanan perikanan, industri pengolahan dan pertambangan penggalian.

sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor dan sektor industri pengolahan merupakan sektor yang perannya semakin meningkat selama tiga tahun berturut-turut. Sedangkan ketiga sektor lainnya perannya sangat fluktuatif selama tiga tahun berturut-turut. Hal ini berarti Kabupaten Karimun mulai bertransformasi dari sektor primer menuju sektor sekunder. Dengan demikian, diharapkan kemakmuran masyarakat Kabupaten Karimun semakin meningkat dari tahun ke tahun dan semakin merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Industrialisasi yang terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Karimun yang berbasis pertanian maupun *shipyard* sudah mulai memperlihatkan hasilnya. Walaupun secara kuantitatif masih rendah namun bersama-sama dengan sektor pertambangan dan penggalian secara kualitas sektor ini mulai menunjukkan peningkatan.

TABEL 3.4
PDRB KABUPATEN KARIMUN ATAS DASAR HARGA BERLAKU
MENURUT LAPANGAN USAHA 2013-2016 (Juta Rp)

LAPANGAN USAHA	2013	2014*	2015*	2016
1. Pertanian, Kehutan dan Perikanan	1.342.153	1.472.808	1.597.671	1.740.622
2. Pertambangan & Penggalian	902.689	967.553	1.056.223	1.141.726
3. Industri Pengolahan	1.110.983	1.225.032	1.378.408	1.535.871
4. Pengadaan Listrik & Gas	23.742	21.689	23.369	25.081
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, Daur Ulang	3.286	3.655	4.107	4.519
6. Konstruksi	1.202.722	1.376.853	1.557.944	1.714.433
7. Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	1.303.083	1.502.311	1.709.030	1.937.830
8. Transportasi dan Pergudangan	263.480	321.904	382.672	439.840
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	153.655	171.319	194.527	216.697
10. Informasi dan Komunikasi	227.004	241.108	259.503	276.811
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	130.118	143.589	161.118	177.759
12. Real Estate	243.554	271.536	302.909	332.259
13. Jasa Perusahaan	1.071	1.211	1.387	1.550
14. Adm Pemerintahan, Pertanahan dan Jamsos Wajib	314.109	345.551	377.338	407.088
15. Jasa Pendidikan	268.097	290.284	317.197	346.797
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	125.760	140.039	155.092	171.730
17. Jasa Lainnya	117.666	130.188	147.431	161.670
PDRB	7.733.182	8.626.640	9.625.935	10.632.290

Sumber : BPS Kabupaten Karimun, Tahun 2018

Sektor perdagangan besar dan enceran, reparasi mobil dan sepeda motor di Kabupaten Karimun mempunyai kontribusi yang terbesar bagi pembentukan PDRB. Setiap tahun sektor ini mengalami peningkatan kontribusi, diperkirakan pada tahun 2017 kontribusi pada sektor ini mencapai 1.937.830,12 juta rupiah dengan peranan sebesar 13,38 persen.

Sektor pertanian kehutanan dan perikanan, dimana sebagian besar masyarakat Kabupaten Karimun bekerja pada sektor ini, menduduki peringkat kedua dalam kontribusi terhadap PDRB. Kontribusi sektor ini yaitu sebesar 1.740.622,52 juta rupiah meningkat dari tahun lalu sebesar 1.597.671,97 juta rupiah, meskipun secara peranan, sektor pertanian kehutanan dan perikanan selalu mengalami penurunan. Hal ini kemungkinan disebabkan karena faktor harga yang semakin meningkat, namun sulitnya meningkatkan nilai tambah produk pertanian dibanding produk lainnya juga menjadi salah satu penyebab turunnya kontribusi pertanian dalam pembentukan PDRB.

Sektor konstruksi menempati urutan ketiga dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB. Kontribusi sektor ini pada tahun 2016 mencapai 1.714.433,71 juta rupiah dengan peranan sebesar 10,04 persen.

Kontribusi sektor industri pengolahan pada tahun 2016 menduduki posisi keempat, diproyeksikan mencapai 1.535.871,88 juta rupiah dengan peranan sekitar 11,42 persen. Peranan sektor ini setiap tahun mengalami peningkatan.

Sektor yang mempunyai kontribusi yang cukup besar kelima bagi pembentukan PDRB adalah sektor pertambangan dan penggalian. Kontribusi pada sektor ini mencapai 1.141.726.47 juta rupiah dengan peranan sebesar 8,09 persen.

Sedangkan sektor lainnya mempunyai kontribusi yang relatif kecil. Sektor dengan kontribusi kurang dari 1 persen adalah sektor pengadaan listrik dan gas, pengadaan air dan jasa perusahaan. Secara umum, besaran nilai PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2015.

2. BIDANG SOSIAL

Indikator kinerja makro bidang sosial merujuk pada tingkat keberhasilan pembangunan Kabupaten Karimun dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Aspek-aspek sosial yang ditelaah adalah sebagai berikut :

a. Kependudukan

1). Struktur Usia Penduduk Berdasarkan Umur

Jumlah penduduk dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan migrasi. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas yang bagus akan menjadi potensi yang besar untuk memajukan suatu daerah. Dilihat dari tabel dibawah, berdasarkan dari data proyeksi Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun ada kenaikan jumlah penduduk tahun 2016 sebanyak 0,88 persen jika disbanding kan dengan Tahun 2015. Pertambahan penduduk Kabupaten Karimun masih pada batas wajar mengingat wilayah Kabupaten Karimun adalah wilayah perbatasan dimana migrasi masuk-keluar cukup tinggi dilihat dari struktur usia penduduk Kabupaten Karimun termasuk umur muda, lebih dari separuh penduduk (53,66 persen) berada pada golongan umur 20-59 tahun. Golongan ini merupakan golongan umur yang sedang aktif bekerja (produktif). Penyediaan lapangan usaha yang sebanyak-banyaknya sangat diperlukan. Golongan umur terbesar kedua adalah umur 5-19 tahun sebanyak 68.705 orang (30,22 persen). Golongan umur ini merupakan golongan usia sekolah sehingga sangat diperlukan fasilitas pendidikan yang cukup dan memadai. Sedangkan untuk golongan umur lebih dari 59 tahun merupakan kelompok umur yang paling sedikit sekitar 7,45 persen dari total penduduk tahun 2016.

TABEL 3.5
JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR
TAHUN 2014-2016

NO	KELOMPOK USIA	2014 (ORANG)	2015 (ORANG)	2016
1.	0 – 4 Tahun	21.446	21.595	19.662
2.	5 – 19 Tahun	66.091	66.771	68.705
3.	20 – 59 Tahun	120.806	121.886	121.971
4.	>59 Tahun	14.774	15.046	16.939
JUMLAH		223.117	225.298	227.277

*) Angka sangat sementara

Sumber : BPS Kabupaten Karimun, Tahun 2018

Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Karimun menurut kelompok umur produktif berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada table 3.6 di bawah ini :

TABEL 3.6
JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR PRODUKTIF
DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2016

NO	KELOMPOK USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	0 – 14 Tahun	35.970	34.247	70.217
2	15 – 64 Tahun	74.848	72.054	146.902
4	>65 Tahun	4.996	5.162	10.158
JUMLAH		115.814	111.463	227.277

Sumber : BPS Kabupaten Karimun, Tahun 2018

2). Angka Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk disuatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. Angka pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah (kelahiran dan kematian) maupun migrasi penduduk. Indikator laju pertumbuhan penduduk berguna untuk melihat kecenderungan dan memproyeksi jumlah penduduk dimasa depan. Angka pertumbuhan penduduk Kabupaten Karimun disajikan pada tabel 3.7 di bawah ini :

TABEL 3.7
ANGKA PERTUMBUHAN PENDUDUK KABUPATEN KARIMUN

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Angka Pertumbuhan Penduduk (%)
1	2012	225.861	1,08
2	2013	229.574	1,10
3	2014	223.117	1,01
4	2015	225.298	0,98
5	2016	227.277	0,88

Sumber : BPS Kabupaten Karimun, Tahun 2017

b. Angkatan Kerja dan Ketenagakerjaan

1). Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja

Tenaga kerja (manpower) adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (15-64 tahun) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Penduduk pada usia ini merupakan penduduk yang termasuk usia produktif. Indikator jumlah penduduk berdasarkan usia ini berguna sebagai wacana pengambil kebijakan dalam menyusun rencana ketenagakerjaan. Disamping itu, juga untuk mengetahui seberapa banyak tenaga kerja (penduduk usia kerja) yang potensial.

TABEL 3.8
PENDUDUK KABUPATEN KARIMUN
MENURUT KELOMPOK UMUR PRODUKTIF 2016*

NO	KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1.	0-14	35.970	34.247	70.217
2.	15-64	74.848	72.054	146.902
3.	>65	4.996	5.162	10.158
TOTAL		115814	111.463	227.277

*) Angka sementara

Sumber : BPS Kabupaten Karimun, 2017

2). Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)

Angka partisipasi angkatan kerja menyajikan data yang menggambarkan banyaknya angkatan kerja, yaitu penduduk yang sedang bekerja dan yang mencari pekerjaan dari penduduk usia 15-64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun secara keseluruhan.

Indikator ini bermanfaat untuk mengetahui bagian dari tenaga kerja yang benar-benar terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu.

TABEL 3.9
PERSENTASE PENDUDUK USIA KERJA
MENURUT JENIS KEGIATAN UTAMA KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2016

NO	KEGIATAN UTAMA	JENIS KELAMIN		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Angkatan Kerja	82,30	35,35	59,24
	a. Bekerja	77,42	33,54	55,87
	b. Mencari kerja	4,88	1,80	3,37
2	Bukan Angkatan Kerja	17,70	64,65	40,76
	a. Sekolah	7,85	9,37	78,60
	b. Mengurus rumah tangga	0,44	52,25	25,89
	c. Lainnya	9,40	3,04	6,28

Sumber : Sumber : BPS Karimun, Tahun 2017

c. Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan bagian terpadu dari pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan batin. Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dikatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Derajat kesehatan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia, sumber daya manusia yang sehat akan lebih produktif dan meningkatkan daya saing bangsa, oleh karena itu pembangunan kesehatan menempati peran yang sangat penting.

Pemerintah Kabupaten Karimun dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat terus dilakukan melalui dinas dan instansi terkait yakni Dinas Kesehatan, Puskesmas, UPTD JPKM serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten.

Pembangunan kesehatan ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana kesehatan dan kemudahan aksesnya. Indikator yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat kesehatan antara lain angka kesakitan masyarakat, status gizi balita, jumlah tenaga kesehatan dan jumlah fasilitas kesehatan, adapun sarana prasarana kesehatan yang tersedia di Kabupaten Karimun sebagai berikut :

TABEL 3.9
SARANA KESEHATAN DI KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2012-2016

NO	SARANA DAN PRASARANA	TAHUN				
		2012		2012		2012
1.	Rumah Sakit	2	2	2	2	2
2.	Puskesmas	9	9	9	10	10
3.	PKM. Pembantu	37	37	37	37	37
4.	Polindes	70	70	70	82	82
5.	Rumah Besalin	2	2	2	2	2
6.	BP/Klinik	2	2	2	12	14
7.	Laboratorium	2	2	2	2	3
8.	Optikal	6	6	6	6	6
9.	Apotik	20	18	19	19	20
10.	Toko Obat	50	47	47	47	43
11.	Posyandu Balita	212	215	218	220	223
12.	Posyandu Lansia	107	112	111	113	119
13.	Puskel Roda 4	17	17	16	16	16
14.	Puskel Laut	2	4	7	7	7
15.	Kendaraan Roda 2	51	51	81	81	81

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, Tahun 2017

Adapun tenaga kesehatan/tenaga medis di Kabupaten Karimun pada tahun 2016 sebanyak 817 orang, yang terdiri dari tabel berikut :

TABEL 3.10
TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2016

NO	JENIS PENDIDIKAN	DIN KES	PUSKES MAS	FASILITAS KESEHATAN LAIN		JUMLAH
				RSUD	SWASTA	
1.	Kedokteran Spesialis	0	0	17	8	25
2.	Kedokteran Umum	6	34	12	6	58
3.	Kedokteran Gigi	1	17	3	1	22
4.	S1 Kesmas	20	14	2	0	36
5.	S1 farmasi Apoteker	2	6	15	8	31
6.	DIII Rekam Medis	0	0	5	5	10
7.	DIII Bidan	6	163	23	9	201
8.	DIII Perawat	5	156	129	69	359
9.	DIII Perawat Gigi	0	5	2	0	7
10.	DIII Farmasi	0	3	2	2	7
11.	DIII Kesling	4	7	1	0	12
12.	DIII Gizi	3	5	2	1	11
13.	DIII Fisiotrafi	0	0	4	0	4
14.	DIII Radiologi	0	3	6	3	12
15.	DIII elektromedik	0	0	1	1	2
16.	DIII Analis Kesehatan	1	9	6	4	20
JUMLAH		48	422	230	117	817

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, Tahun 2017

Pandangan atau paradigma pemerintah tentang arti kesehatan yang baru dicanangkan dalam pembangunan kesehatan secara umum mempunyai arti pembangunan dari berbagai sektor yang harus memberi dampak positif pada lingkungan dari perilaku hidup sehat. Secara khusus memberi penekanan pada upaya promotif dan preventif tanpa melupakan upaya kuratif dan rehabilitatif.

Ada beberapa indikator kesehatan yang perlu ditinjau dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Karimun, antara lain adalah :

1). Jumlah Kelahiran

Berikut disajikan tabel Jumlah Kelahiran menurut jenis kelamin tiap kecamatan di Kabupaten Karimun tahun 2016.

TABEL 3.11
JUMLAH KELAHIRAN MENURUT JENIS KELAMIN
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2017

NO	KECAMATAN	BANYAKNYA KELAHIRAN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Moro	136	151	287
2	Durai	64	44	108
3	Kundur	254	229	483
4	Kundur Utara	95	90	185
5	Kundur Barat	161	155	316
6	Karimun	467	452	919
7	Buru	68	70	138
8	Meral	389	367	756
9	Tebing	195	161	356
10	Meral Barat	149	106	255
11	Belat	51	47	98
12	Ungar	40	48	88
TOTAL		2.069	1.920	3.989

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, Tahun 2017

2). Angka Kelahiran Kasar

Berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Karimun pada pertengahan tahun 2016 adalah 237.720 jiwa maka Angka Kelahiran Kasar di Kabupaten Karimun Tahun 2016 di tiap kecamatan dapat di lihat pada tabel berikut :

TABEL 3.12
ANGKA KELAHIRAN KASAR KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2016

NO.	KECAMATAN	PENDUDUK PADA PERTENGAHAN TAHUN		KELAHIRAN ANAK		CBR
		JLH	%	JLH	%	
1.	Moro	17.836	7.5	287	7.2	16.10
2.	Durai	5.746	2.4	108	2.7	15.14
3.	Kundur	31.894	13.4	483	12.1	15.14
4.	Kundur Utara	12.242	5.2	185	4.6	15.11
5.	Kundur Barat	16.632	7.0	316	7.9	19.0
6.	Karimun	50.739	21.3	919	23.0	18.11
7.	Buru	10.047	4.2	138	3.5	13.74
8.	Meral	43.074	18.1	756	19.0	18.0
9.	Tebing	25.062	10.5	356	8.9	14.20
10.	Meral Barat	12.569	5.3	255	6.4	20.30
11.	Belat	6.335	2.7	98	2.5	16.0
12.	Ungar	5.544	2.4	88	2.2	16.0
JUMLAH		237.720	100	3.989	100	16.78

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, Tahun 2017

3). Umur Harapan Hidup (UHH)

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang optimal. Keberhasilan program kesehatan pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu daerah. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang Umur Harapan Hidupnya.

Besarnya Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk di suatu daerah diukur melalui Angka Harapan Hidup waktu lahir (AHH_{e0}). Dengan asumsi kecenderungan Angka Kematian Bayi (AKB) semakin menurun, serta terjadi perubahan susunan umur penduduk.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Karimun Umur Harapan Hidup pada tahun 2016 adalah 70,20 Tahun (Angka Proyeksi).

TABEL 3.13
DATA PERKEMBANGAN USIA HARAPAN HIDUP (UHH)
DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2011-2016

NO	TAHUN	USIA HARAPAN HIDUP/UHH (TAHUN)
1.	2011	69,93
2.	2012	69,94
3.	2013	70,11
4.	2014	70,15
5.	2015	70,27
6.	2016	70,20

Sumber : BPS Kabupaten Karimun , Tahun 2017

d. Pendidikan

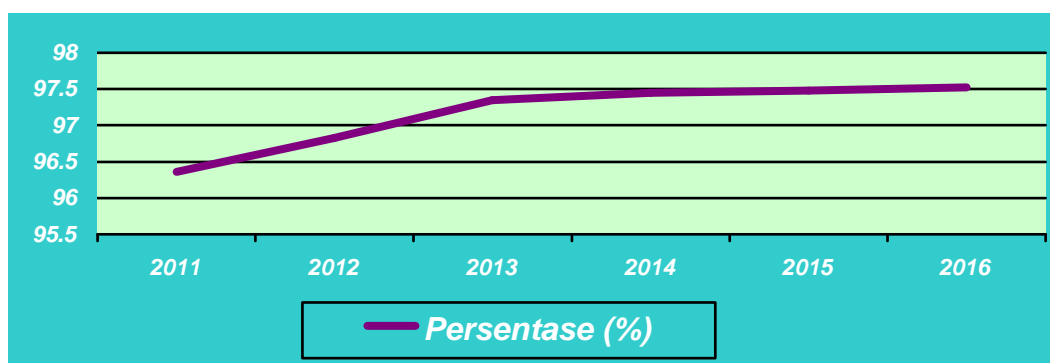
Angka Melek Huruf didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk yang melek huruf dengan penduduk seluruhnya di suatu daerah dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi nilai melek huruf berarti makin baik mutu penduduk di suatu daerah. Angka Melek Huruf juga bisa diartikan sebagai

kemampuan dalam membaca dan menulis. Kemampuan membaca dan menulis dipandang sebagai kemampuan dasar minimal yang harus dimiliki oleh setiap individu, agar paling tidak memiliki peluang untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Kegunaan Angka Melek Huruf adalah untuk mengetahui banyaknya penduduk yang melek huruf di suatu daerah sehingga dapat diketahui berapa besar jumlah penduduk yang masih buta huruf, sehingga dapat ditentukan cara penanggulangan Buta Huruf melalui berbagai kebijakan di bidang pendidikan. Angka Melek Huruf juga digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia, yang masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD. Selain itu untuk menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media serta menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf berdasarkan kabupaten dapat mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Sama halnya dengan Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf juga merupakan indikator nonpendidikan yang secara langsung dapat mempengaruhi kinerja pembangunan pendidikan. Oleh karena itu Angka Melek Huruf tidak dapat dipisahkan dari data pendidikan yang ada, melainkan sebagai pelengkap atau penunjang data pendidikan yang ada. Dari Grafik 3.2 berikut ini, tampak bahwa Angka Melek Huruf di Kabupaten Karimun dari tahun ke tahun semakin meningkat.

GRAFIK 3.14
ANGKA MELEK HURUF (AMH) KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2011-2016

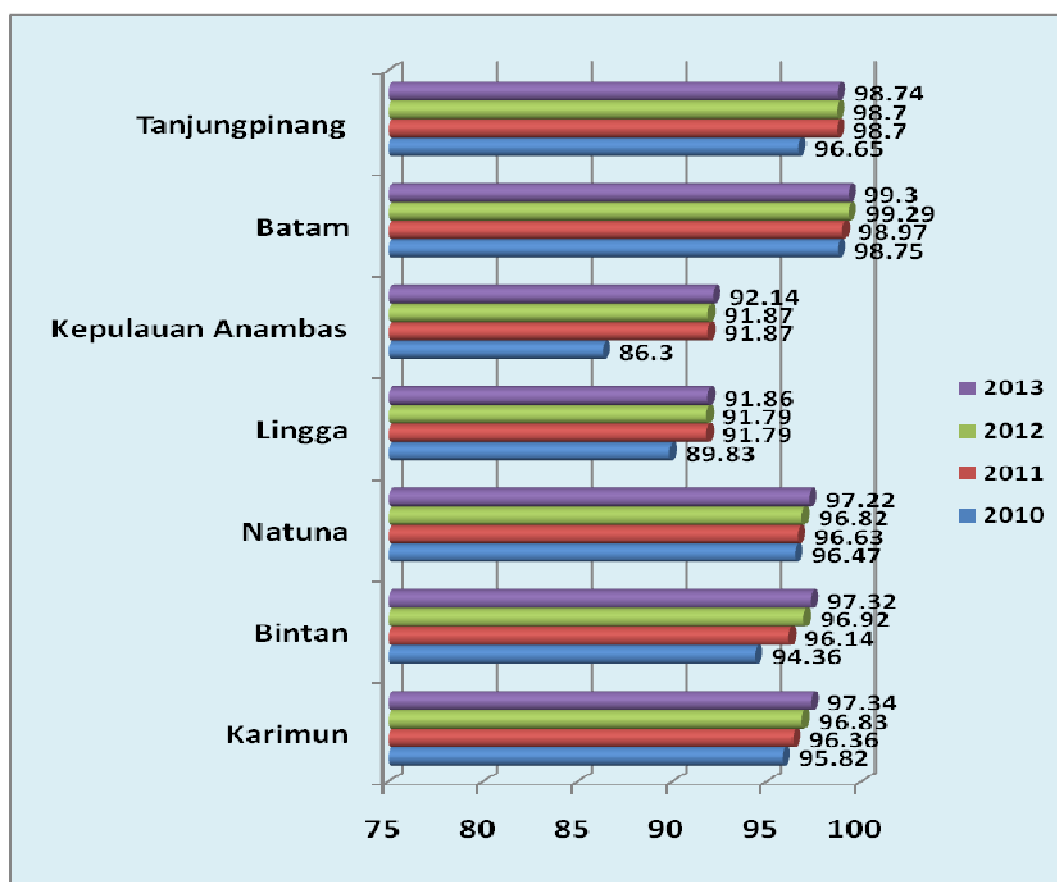


Sumber : BPS Kabupaten Karimun Tahun 2017

Pada tahun 2011 AMH Kabupaten Karimun sebesar 96,36% meningkat di Tahun 2012 sebesar 96,83%, meningkat lagi di tahun 2013 menjadi sebesar 97,35% dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 97,45%, kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi 97,48%, dan pada tahun 2016 menjadi 97,52%. Dengan kondisi ini, jumlah penduduk di Kabupaten Karimun yang masih mengalami buta huruf sebanyak 2,48%. Pemerintah Kabupaten Karimun akan terus berupaya dan bekerja keras agar seluruh penduduk yang masih buta huruf dapat dituntaskan.

Berbagai program pembangunan telah dan akan terus dilakukan, diantaranya melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Program Pendidikan Menengah. Program-program ini diaplikasikan melalui kegiatan-kegiatan Paket A, Paket B, Paket C, Keaksaraan Fungsional, Pendidikan Inklusif dan lain sebagainya. Tidak hanya menyelenggarakan melalui lembaga pendidikan formal dan nonformal, Pemerintah akan turun ke lapangan dan mendekat dengan kantong-kantong penduduk yang teridentifikasi masih terdapat buta huruf. Hal ini menunjukkan bukti akan komitmen Pemerintah Kabupaten Karimun dalam meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan.

GRAFIK 3.15
ANGKA MELEK HURUF (AMH) KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2012-2015



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Apabila ingin dibandingkan dengan pencapaian Angka Melek Huruf di Kabupaten / Kota lain di Provinsi Kepulauan Riau, maka data yang tersedia paling tinggi berada pada tahun 2013, sebagaimana yang tertera pada Grafik 3.15.

Seluruh Kabupaten / Kota di Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan Angka Melek Huruf dari tahun 2010 ke tahun 2013. Sedangkan rata-rata AMH Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2010 sebesar 94,03 % dan pada tahun 2013 naik menjadi 96,27 %. Pada tahun 2013, hanya Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas saja yang rata-rata Angka Melek Hurufnya masih dibawah rata-rata Angka Melek Huruf Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan Kabupaten / Kota lain, termasuk Kabupaten Karimun berada diatas rata-rata AMH Provinsi Kepulauan Riau.

e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indikator untuk menganalisis kinerja pembangunan digunakan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat digunakan untuk menilai keberhasilan implementasi dari program pembangunan, karena pada hakekatnya tujuan akhir dari pembangunan (*the ultimate end*) adalah penduduk (manusia), sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk.

Pelaksanaan pembangunan manusia lebih luas konteksnya, mengandung tiga unsur yang dinilai sangat penting dan berfokus pada pemberdayaan penduduk, yaitu produktivitas, pemerataan, dan kesinambungan. Pembangunan manusia dilakukan untuk memperluas peluang penduduk mencapai hidup layak, yang secara umum dapat dilakukan melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar dan daya beli. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar merupakan upaya meningkatkan produktivitas penduduk melalui peningkatan pengetahuan dan derajat kesehatan.

Berdasarkan klasifikasi *United Nations Development Programme (UNDP)* tingkatan status pembangunan manusia suatu wilayah atau negara dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

- 1) 0 - <50 : rendah
- 2) 50 - <65 : menengah bawah
- 3) 65 - <80 : menengah atas
- 4) ≥80 : tinggi

Pencapaian IPM Kabupaten Karimun pada tahun 2014 menunjukkan nilai sebesar 68,72. Kondisi ini menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Karimun termasuk dalam klasifikasi menengah atas. Perkembangan IPM Kabupaten Karimun menempati peringkat ke-5 dari 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.

Dari table di bawah ini memperlihatkan angka dan peringkat IPM sepuluh dan lima tahun terakhir.

TABEL 3.16.
ANGKA DAN PERINGKAT IPM
KABUPATEN/KOTA SE- PROVINSI KEPRI

KABUPATEN	ANGKA IPM			PERINGKAT IPM		
	2005	2010	2014	2005	2010	2014
Karimun	71,71	66,40	68,72	3	4	5
Bintan	70,90	69,87	71,65	4	3	3
Natuna	68,40	66,29	70,06	6	5	4
Lingga	69,39	57,36	60,76	5	7	7
Kepulauan Anambas	68,33	63,03	65,12	-	6	6
Kota Batam	76,55	76,98	79,13	1	1	1
Kota Tanjung Pinang	71,71	66,40	68,72	3	4	5

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Tabel
AKUNTABILITAS KEUANGAN

NO	SASARAN	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN		
				KEUANGAN	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi di Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru	103,23%	Peningkatan Promosi dan Kerjasama	275.000.000	268.331.900	98,32%
			Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	100.000.000	99.521.000	99,52%
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.899.900.000	2.626.637.000	90,58%
			Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	341.080.000	294.827.000	86,44%
			Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	924.749.762	924.749.762	100%
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum	36.597.366.155	26.174.511.940	71,52
			Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	8.610.160.000	4.348.311.300	50,50%
2.	Memantapkan Kewirausahaan Petani dan Nelayan	112,28%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	2.000.000.000	2.575.000.000	128,75%
			Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	120.000.000	125.000.000	95,81 %
3.	Meningkatnya Produktivitas dan Produksi Sektor Pertanian dan Perikanan	87,71%	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	1.625.000.000	1.601.911.078	98,57%
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	650.000.000	619.049.200	95,23%
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap	2.255.118.000	2.255.118.000	99,35%
			Program Pengembangan Budidaya Perikanan	270.000.000	263.375.500	97,55%
4.	Tercapainya Konsumsi Energi Pangan	101,39%	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan	4.899.950.100	4.886.735.752	99,73%
			Program Peningkatan ketersediaan Akses dan distribusi Pangan	250.000.000	227.443.000	90,98%
5.	Terwujudnya Karimun Sebagai Daerah Wisata	103,025%	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	275.000.000	257.714.974	93,71%
			Pengembangan Kemitraan	40.354.853.000	35.960.141.460	89,11%

NO	SASARAN	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN		
				KEUANGAN	REALISASI	%
6.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penghubung Antar Wilayah	107,98%	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	1.562.877.722	1.525.623	97,64%
			Program Pembangunan Dermaga/ Pelabuhan /Tambatan Perahu Kabupaten Karimun	13.625.863.440	13.275.816.000	97,43%
			Program Pengembangan Lingkungan dan Permukiman	2.892.166.000	608470000	21,04%
7	Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Dasar	103,90%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	580.000.000	72.195.000	12,45%
			Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	80.000.000	52786900	65,98%
			Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	5.304.944.000	5.296.704.000	99,84%
8.	Menurunnya Penduduk Miskin	89,73%	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun 2016	812.370.694	812.370.694	100,00%
			Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	480.000.000	264.854.000	55,17%
			Program Pembinaan Penduduk Terlantar	470.000.000	357.768.500	76,12%
			Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	200.000.000	180.054.100	90,02%
			Program Keluarga Harapan	450.000.0000	332.178.500	73,81%
9.	Meningkatnya Derajat Kesehatan	40,12%	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik Tahun 2017)	801.726.000	507.147.163	63,26%
			Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	310.000.000	212.606.350	68,58%
			Perbaikan Gizi Masyarakat	180.000.000	95.112.025	52,84%
			Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.501.962.283	1.052.955.278	70,11%
			Upaya Kesehatan Masyarakat	70.000.000	45.998.500	65,71%

NO	SASARAN	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN		
				KEUANGAN	REALISASI	%
10	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	99,31%	Pendidikan Non Formal	2.140.000.000	2.020.884.79	94,43%
			Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	11.013.500.000	10.718.059.848	97,32%
			Pendidikan Anak Usia Dini	1.558.000.000	1.501.188.580	96,35%
11.	Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal	82,09%	Program Perencanaan dan Pembangunan Daerah	100.000.000	76.863.150	76,86%
			Program Peningkatan Kesempatan dan Perluasan Kerja	65.000.000	61.847.700	95,15%
12.	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Kesenjangan Gender	99,67%	Program Pengutan Kelembagaan Pengarusutaman Gender dan Anak	650.000.000	636.927.150	97,98%
			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	100.000.000	99.954.500	99,95%
13.	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	79,16%	Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	530.000.000	529.954.500	99,99%
			Program Peningkatan Peran Kapasitas Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	250.000.000	249.810.500	99,92%
			Program Pengembangan data / Informasi	100.000.000	99.669.500	99,66%
14.	Terwujudnya Pola dan Struktur Ruang yang Sesuai Dengan Tata Ruang Wilayah	100,41%	Program Perencanaan Tata Ruang	1.679.940.000	1.152.756.000	68,62%
15.	Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup	106,49%	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	31.805.000	31.805.000	100
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	80.000.000	79.926.366	99,91%.
			Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	515.074.288	511.181.804	99,24%
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	87.000.000	24.198.764	27,81%.

NO	SASARAN	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN		
				KEUANGAN	REALISASI	%
16.	Meningkatnya Aktivitas-Aktivitas Keagamaan	131,49%	Program Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan	4.511.000.000	4.070.812.500	90,24%
17.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah	100,04%	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	250.000.000	241.286.400	96,51%
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.533.632.500	2.297.527.350	90,68%
18.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	106,66%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	564.740.861	564.740.861	100%
			Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.	678.987.500	612.764.843	90,25%
			Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	8.681.820.126	6.052.298.155	69,71%
			Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasaana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	351.969.350	347.438.700	98,71%
			Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	1.466.000.000	1.291.113.574	88,07%
	CAPAIAN KINERJA (%)	97,48%	JUMLAH BELANJA LANGSUNG PROGRAM UTAMA KINERJA	171.388.556.780	134.987.760.844	78,76%
			JUMLAH BELANJA LANGSUNG PROGRAM PENDUKUNG KINERJA	671.758.885.393	602.643.675.929	89,71%
			TOTAL BELANJA LANGSUNG	843.147.442.173	737.631.436.773	87,48%

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Gambaran tentang kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun selama tahun 2017 telah tergambar pada Bab III Akuntabilitas Kinerja. Tahun 2017 ini adalah tahun terakhir masa berlaku dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Kekurangan yang terjadi selama tahun 2017 telah dicatat dan akan dievaluasi sebagai bahan untuk menyusun kebijakan operasional guna memperbaiki kinerja tahun 2018. Sasaran kinerja yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi agar kendala yang dihadapi dapat dicari solusinya sedini mungkin, sehingga seluruh sasaran kinerja tahun 2017 mendatang dapat dicapai dengan lebih baik dari tahun ke tahun. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar dapat diketahui kendala yang dihadapi dan risiko kegagalannya sedini mungkin dan dicari solusinya, sehingga Visi dan Misi Bupati dapat dicapai. Selama tahun 2017 ini ditemui adanya hambatan-hambatan yang mempengaruhi sasaran strategis tidak tercapai seratus persen, antara lain:

1. Masih adanya aparatur yang kurang menyadari tekad pemerintah untuk menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik, secara efisien dan efektif.
2. Masih kurang optimalnya perhatian yang diberikan oleh pimpinan OPD dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Belum sempurnanya administrasi untuk mendukung data faktual guna memenuhi indikator target sasaran organisasi.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Secara ringkas keseluruhan capaian kinerja tersebut, merupakan masukan yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Sesuai hasil analisis capaian kinerja pada Tahun 2017, dapat dirumuskan beberapa langkah

penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan pada masa yang akan datang, yaitu sebagai berikut :

1. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk memperteguh pelaksanaan pemerintahan yang baik sehingga tidak hanya menjadi wacana dan pemikiran semata-mata, namun benar-benar dapat diaplikasikan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat.
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan adalah sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi yang secara konsisten harus dipedomani untuk pencapaian tujuan.
3. Perlu mengidentifikasi lebih awal terhadap kemungkinan risiko-risiko kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi, sehingga secara dini dapat menetapkan cara-cara untuk menentukan solusi serta menetapkan sasaran secara lebih akurat dan real.
4. Melakukan perbaikan perencanaan dan indikator kinerja baik ditingkat Kabupaten maupun OPD yang baru melalui manajemen kinerja.
5. Memperbaiki sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja guna pemenuhan indikator sasaran organisasi secara maksimal dengan, meningkatkan pemanfaatan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja OPD yang baru.
6. Meningkatkan fungsi pengawasan/pengendalian agar berjalan lebih optimal.

**PENGUKURAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2017**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2017	REALISASI	CAPAIAN	INSTANSI
1.	Meningkatkan aktivitas ekonomi di pusat pertumbuhan ekonomi	1. Nilai ekspor (USD)	472.176.265	1.342.470.000	284.31 %	Disdagkop, UKM dan ESDM
		2. Nilai investasi (Rp)	21.600.000.000.000	21.977.557.079.780	101.38 %	DPMPTSP
		3. Jumlah kawasan strategis	4 kawasan strategis	4 kawasan strategis	100 %	DISPUPR
2.	Memantapkan kewirausahaan petani dan nelayan	1. Nilai kredit dari perbankan yang tersalurkan untuk petani dan nelayan (Rp)	1.000.000.000	2.575.000.000	257.5 %	1.DISPATAN 2.Disdagkop, UKM dan ESDM
		2. Persentase petani dan nelayan yang menerima kredit	65 %	62.28 %	95.81 %	1.DISPATAN 2.Disdagkop, UKM dan ESDM
3.	Meningkatkan produktivitas dan produksi sektor pertanian dan perikanan	1. Jumlah produksi tanaman pangan dan perkebunan (Ton/Tahun) - Padi - Jagung - Karet - Kelapa	150 270 3.650 800	110 230 2.623 770	73 % 85 % 72 % 96 %	DISPATAN

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2017	REALISASI	CAPAIAN	INSTANSI
		2. Produktivitas komoditas tanaman pangan dan perkebunan (Ton/Ha) - Padi - Jagung - Karet - Kelapa	2.3 2.8 0.34 0.60	2.3 2.8 0.34 0.57	100 % 100 % 100 % 95 %	DISPATAN
		3. Jumlah produksi perikanan	50.000 ton	66.126 ton	132 %	DISKAN
		4. Jumlah ekspor usaha perikanan	6.800 ton	10.111.746 ton	148.70 %	DISKAN
4.	Tercapainya konsumsi energi pangan	1. Konsumsi energi perkapita (Kal/Hari/Kap)	1.940	1.940	100 %	DISPATAN
5.	Terwujudnya Karimun sebagai daerah wisata	1. Jumlah kunjungan wisatawan asing	101.796 orang	93.517 orang	92 %	DISPARBUD
		2. Rata-rata lama wisatawan menginap	1.2 hari	1.37 hari	114 %	DISPARBUD
6.	Meningkatnya sarana dan prasarana penghubung antar wilayah	1. Panjang jalan terhubung antar wilayah dalam kondisi baik	537.98 km	553.66 km	102.91 %	DISPUPR

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2017	REALISASI	CAPAIAN	INSTANSI
		2. Jumlah titik akses penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk minimal dilalui roda 4	953 titik	1.017 titik	106.72 %	DISPUPR
		3. Persentase pulau berpenghuni yang terjangkau transportasi laut regular	28.57 %	37.14 %	130 %	DISHUB
		4. Persentase pelabuhan laut yang memadai	79.82 %	79.82 %	100 %	DISHUB
7.	Meningkatnya pemerataan infrastruktur dasar	1. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	50.23 %	58.60 %	107.90 %	DISPUPR
		2. Proporsi panjang jaringan jalan aspal dalam kondisi baik	54.31 %	50.32 %	138.35 %	DISPUPR
		3. Persentase wilayah terlayani jaringan komunikasi	85 %	81.69 %	96.1 %	Bagian Humas Setda
8.	Menurunnya penduduk miskin	1. Persentase penduduk miskin	6.72 %	-	-	DINSOS
9.	Meningkatnya derajat kesehatan	1. Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan	325 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)	327.8	99 %	DINKES

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2017	REALISASI	CAPAIAN	INSTANSI
		2. Angka Kematian Bayi (AKB)	24 per 1.000 Kelahirann Hidup (KH)	15.8	152 %	DINKES
		3. Prevalensi terhadap penyakit HIV / AIDS	< 0.5 %	0.12	417 %	DINKES
		4. Angka Harapan Hidup (tahun)	70.54	-	-	DINKES
10.	Meningkatnya kualitas pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) - SD / MI - SMP / MTs	107 % 101.25 %	-	- - -	DISDIK
		2. Angka Partisipasi Murni (APM) - SD / MI - SMP / MTs	97.6 % 75 %	- -	- -	DISDIK
		3. Angka pendidikan yang ditamatkan - SD / MI - SMP / MTs	54.000 orang 34.500 orang	54.000 orang 35.500 orang	100 % 100 %	DISDIK
		4. Angka melek huruf	98.1 %	-	-	DISDIK
		5. Angka harapan lama sekolah	11.96 %	-	-	DISDIK
11.	Meningkatnya pertumbuhan tenaga kerja lokal	1. Tingkat partisipasi angkatan kerja	60.19 %	59.05 %	98 %	DISNAKERIND
		2. Persentase peningkatan penerimaan tenaga kerja lokal	35 %	36 %	103 %	DISNAKERIND

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2017	REALISASI	CAPAIAN	INSTANSI
12.	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan kesetaraan gender	1. Indeks Pembangunan Gender	91.48 %	91.18 %	99.67 %	DISDALDUK, KB, PP&PA
		2. Persentase peningkatan penerimaan tenaga kerja lokal	52.95 %	-	-	DISDALDUK, KB, PP&PA
13.	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0.84 %	-	-	DISDALDUK, KB, PP&PA
14.	Terwujudnya pola dan struktur ruang yang sesuai dengan tata ruang wilayah	1. Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang	96.75 %	96.9 %	100.2 %	DISPUPR
15.	Terjaga keselestarian lingkungan hidup	1. Indeks kualitas lingkungan hidup	55 - 60	77.36	128.92 %	DLH
		2. Nilai Adipura	> 70	76.44	109.20 %	1. DLH 2. DISPERKIM
		3. Luas ruang terbuka hijau	196.016 Ha	191.016 Ha	97.45 %	1. DLH 2. DISPERKIM 3. DISPUPR
		4. Luas kawasan rawan bencana yang tertangani	27.5 Ha	27.5 Ha	100 %	1. DLH 2. DISPERKIM 3. DISPUPR
16.	Meningkatnya aktivitas-aktivitas keagamaan	1. Jumlah calon jemaah haji yang mendaftar	188 orang	387 orang	205.85 %	Bagian Kesra Setda
		2. Jumlah muzaki	420 orang	621 orang	147.85 %	Bagian Kesra Setda

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2017	REALISASI	CAPAIAN	INSTANSI
17.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah	1. Indeks akuntabilitas	72	72.06	100.1 %	INSPEKTORAT DAERAH
		2. Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah	WTP	WTP	100 %	BPKAD
18.	Meningkatnya kualitas pelayanan	1. Kualifikasi tenaga pendidik sekurang-kurangnya S1/D IV (orang)	> 3	3.03	101 %	1. DISDUKCAPIL 2. DPMPTSP 3. RSUD

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2017**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2017
1.	Meningkatkan aktivitas ekonomi di pusat pertumbuhan ekonomi	1. Nilai ekspor (USD)	472.176.265
		2. Nilai investasi (Rp)	21.600.000.000.000
		3. Jumlah kawasan strategis	4 kawasan strategis
2.	Memantapkan kewirausahaan petani dan nelayan	1. Nilai kredit dari perbankan yang tersalurkan untuk petani dan nelayan (Rp)	1.000.000.000
		2. Persentase petani dan nelayan yang menerima kredit	65 %
3.	Meningkatkan produktivitas dan produksi sektor pertanian dan perikanan	1. Jumlah produksi tanaman pangan dan perkebunan (Ton/Tahun) - Padi - Jagung - Karet - Kelapa	150 270 3.650 800
		2. Produktivitas komoditas tanaman pangan dan perkebunan (Ton/Ha) - Padi - Jagung - Karet - Kelapa	2.3 2.8 0.34 0.60
		3. Jumlah produksi perikanan	50.000 ton
		4. Jumlah ekspor usaha perikanan	6.800 ton
4.	Tercapainya konsumsi energi pangan	1. Konsumsi energi perkapita (Kal/Hari/Kap)	1.940
5.	Terwujudnya Karimun sebagai daerah wisata	1. Jumlah kunjungan wisatawan asing	101.796 orang
		2. Rata-rata lama wisatawan menginap	1.2 hari
6.	Meningkatnya sarana dan prasarana penghubung antar	1. Panjang jalan terhubung antar wilayah dalam kondisi baik	537.98 km

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2017
	wilayah	2. Jumlah titik akses penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk minimal dilalui roda 4	953 titik
		3. Persentase pulau berpenghuni yang terjangkau transportasi laut reguler	28.57 %
		4. Persentase pelabuhan laut yang memadai	79.82 %
7.	Meningkatnya pemerataan infrastruktur dasar	1. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	50.23 %
		2. Proporsi panjang jaringan jalan aspal dalam kondisi baik	54.31 %
		3. Persentase wilayah terlayani jaringan komunikasi	85 %
8.	Menurunnya penduduk miskin	1. Persentase penduduk miskin	6.72 %
9.	Meningkatnya derajat kesehatan	1. Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan	325 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)
		2. Angka Kematian Bayi (AKB)	24 per 1.000 Kelahirann Hidup (KH)
		3. Prevalensi terhadap penyakit HIV / AIDS	< 0.5 %
		4. Angka Harapan Hidup (tahun)	70.54
10.	Meningkatnya kualitas pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) - SD / MI - SMP / MTs	107 % 101.25 %
		2. Angka Partisipasi Murni (APM) - SD / MI - SMP / MTs	97.6 % 75 %
		3. Angka pendidikan yang ditamatkan - SD / MI - SMP / MTs	54.000 orang 34.500 orang
		4. Angka melek huruf	98.1 %
		5. Angka harapan lama sekolah	11.96 tahun
11.	Meningkatnya pertumbuhan tenaga kerja lokal	1. Tingkat partisipasi angkatan kerja	60.19 %
		2. Persentase peningkatan penerimaan tenaga kerja lokal	35 %
12.	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan kesetaraan gender	1. Indeks Pembangunan Gender	91.48 %
13.	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0.84 %

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2017
14.	Terwujudnya pola dan struktur ruang yang sesuai dengan tata ruang wilayah	1. Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang	96.75 %
15.	Terjaga keselestarian lingkungan hidup	1. Indeks kualitas lingkungan hidup	55 - 60
		2. Nilai Adipura	> 76
		3. Luas ruang terbuka hijau	196.016 Ha
		4. Luas kawasan rawan bencana yang tertangani	27.5 Ha
16.	Meningkatnya aktivitas-aktivitas keagamaan	1. Jumlah calon jemaah haji yang mendaftar	188 orang
		2. Jumlah muzaki	420 orang
17.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah	1. Indeks akuntabilitas	72
		2. Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah	WTP
18.	Meningkatnya kualitas pelayanan	1. Kualifikasi tenaga pendidik sekurang-kurangnya S1/D IV (orang)	> 3



**PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2017**